

BAB II DESKRIPSI DATA

II. 1. Riwayat Penemuan

Berdasarkan laporan Mohammad Umar (1970), prasasti Munḍu^oan ditemukan oleh Tim Survey Jurusan Sejarah IKIP Semarang pada tanggal 27 November 1969 di Dukuh Toro, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini ditemukan oleh penduduk Dukuh Toro bernama Mbok Reti (saat itu berusia 55 tahun). Ia menemukan prasasti Munḍu^oan secara kebetulan di dalam tanah bekas rumpun bambu di belakang rumahnya. Mbok Reti telah menyimpan prasasti ini selama 20 tahun sebelum Tim Survei Jurusan Sejarah IKIP Semarang menemukannya. Menurut keterangan Mbok Reti, prasasti ini ditemukan dalam keadaan *setangkep* dengan bagian yang bertulisan menghadap ke dalam. Oleh Mbok Reti, prasasti ini dianggap sebagai benda keramat sehingga dijaganya dengan baik. Prasasti ini disebut juga sebagai prasasti Jumo sesuai dengan nama tempat ditemukannya. Saat ini prasasti Munḍu^oan disimpan oleh Ny. Aditya (putri alm. Mohammad Umar) di rumahnya di jalan Sriwijaya no.92, Semarang, Jawa Tengah.

Riwayat Penelitian

Mohammad Umar—pengajar jurusan sejarah IKIP Semarang pada saat itu—menerbitkan prasasti ini dalam bentuk makalah pada *Seminar Sejarah Nasional II* yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 26 hingga 29 Agustus 1970. Pembahasan yang dilakukannya menyangkut riwayat penemuan, bentuk aksara, bahasa yang dipakai, penanggalan, keterangan mengenai penguasa yang meresmikan *sīma*, alih aksara, alih bahasa, catatan terjemahan, serta kesimpulan. Mengenai penanggalan, Umar telah berdiskusi dengan Boechari, ketua Jurusan Arkeologi FSUI pada waktu itu dan membaca angka tahunnya adalah 748 Ś (Umar, 1970: 7). Boechari dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia II* (Poesponegoro, ed. 1993:115), angka tahun prasasti Munḍu^oan tertera 728 Ś (21 Januari 807 M). Kozo Nakada (1982) juga pernah menulis sedikit keterangan mengenai prasasti ini dalam bukunya. Hal-hal yang disebutkan oleh Nakada

dalam bukunya misalnya nama prasasti (Muṇḍu^oan atau Jumo), tempat penemuan (Jumo, Temanggung), bahan (tembaga), angka tahun (728 Ś atau 806 M), tempat penyimpanan saat itu (tahun 1982) di Semarang.

Selain itu, Darmosoetopo juga menyebut angka tahun dalam prasasti ini 728 Ś atau 806 M. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa Rakai Patapān Pu Manuku menganugerahkan tanah *sīma* kepada hambanya yang bernama sang Patoran, sedangkan pengabdian wajib (*buatthaji*) yang harus diberikan kepada Rakai Patapān Pu Manuku adalah tugas menggembalakan kambing milik Rakai Patapān Pu Manuku (Darmosoetopo, 2003: 38).

Mengenai Rakai Patapān Pu Manuku, Umar (1970) yang mengutip De Casparis dalam *Inscripties uit de Śailendra Tijd, Prasasti Indonesia I* menyatakan teori bahwa tokoh ini kemungkinan besar adalah Rakai Patapān Pu Palar yang identik juga dengan Rakai Garung yang memerintah antara tahun 828-846 M. Namun apabila ada prasasti lain yang menyebutkan nama Rakai Patapān Pu Manuku tetapi di luar kurun waktu 819-840 M, hal ini akan mematahkan teori de Casparis.

II. 2. Keadaan Prasasti

Prasasti Muṇḍu^oan terdiri atas 2 buah lempeng berbentuk persegi panjang dibuat dari tembaga (*tamra prasasti*). Lempeng pertama berukuran 9,5 x 32,2 cm dengan tebal rata-rata 1 mm, sedangkan lempeng kedua berukuran 9,5 x 31,8 cm dengan bagian tepinya lebih tipis dibandingkan bagian lainnya. Setiap lempeng prasasti memuat tujuh baris tulisan. Bagian yang bertulisan hanya ada pada satu sisi saja dan tidak ada ragam hias apapun. Bagian awal dan akhir prasasti ditandai dengan *adĕg adĕg* yaitu tanda yang berupa dua buah garis yang masing-masing dipahatkan miring ke arah kanan. Selain itu, ada tanda spiral () yang dipahatkan setelah tanda penutup di bagian akhir baris ke tujuh pada lempeng ke dua. Cara pembacaan tulisan pada prasasti ini sama seperti cara pembacaan buku modern saat ini yakni dimulai dari kiri ke kanan.



Foto lempeng pertama prasasti Munđu^oan
Foto oleh: A. Gunawan S (2008)

Sama seperti prasasti batu, prasasti logam pun tidak luput dari kerusakan. Kerusakan lempeng pertama prasasti Munđu^oan lebih banyak di bagian sebelah kanan sehingga beberapa aksara hilang terutama pada akhir dari baris ke enam dan tujuh. Sedangkan bagian kiri dari lempeng pertama ini masih utuh. Bagian ujung kiri atas dan ujung kiri bawah tidak membentuk sudut 90 derajat, tetapi agak tumpul. Bagian akhir baris enam dan tujuh kelihatan patah. Patahan bagian ini miring ke arah kanan dimulai dari bagian kiri bawah lempeng miring ke arah kanan dan berakhir di baris enam yang dilanjutkan kembali dan berakhir pada baris lima. Bagian patahan kelihatan rapi dan halus sehingga timbul kesan bahwa bagian ini mungkin sengaja dipatahkan. Kerusakan lain pada lempeng pertama ini ada di akhir baris pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ketebalan lempeng pertama prasasti ini merata namun pahatan aksaranya tidaklah dalam.



Foto bagian keropos pada lempeng kedua prasasti Munđu^oan
Foto oleh: A. Gunawan S (2008)

Keadaan lempeng kedua prasasti Munđu^oan tidak sebaik keadaan lempeng pertamanya. Bagian tepi kiri dan kanan sangat tipis sehingga mudah *keropos* di bagian ini. Beberapa aksara di bagian kanan lempeng hilang. Kecuali

akhir baris tujuh, semua akhiran dari baris pertama hingga baris enam hilang. Aksara pada bagian awal baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat masih dapat dibaca dengan baik. Aksara pertama pada awal baris kelima tidak ada, juga pada awal baris keenam dan tujuh. Pada bagian ini *keropos* dimulai dari baris enam dan miring ke kanan hingga baris tujuh sehingga beberapa aksaranya hilang. Ketebalan rata-rata permukaan lempeng kedua prasasti Munḍu^oan ini tidaklah sama disetiap tempat—terutama di bagian tepiannya—namun pahatan aksaranya lebih dalam sehingga lebih jelas terlihat. Selain itu hampir seluruh permukaan dari lempeng kedua prasasti ini tertutup patinasi¹⁵.

II. 3. Bentuk Aksara

J. G. de De Casparis dalam buku *Indonesian Palaeography* (1975) menyebutkan bahwa ada 5 tahap perkembangan aksara Jawa yakni:

1. aksara Pallawa yang berkembang sebelum 700 M
2. aksara Jawa Kuno awal atau Kawi awal (termasuk di dalamnya aksara Kawi standar) berkembang antara tahun 750 hingga 925 M
3. aksara Jawa Kuno akhir atau Kawi akhir yang berkembang sejak 925 hingga 1250 M
4. aksara Majapahit berkembang sejak tahun 1250 hingga 1450 M
5. aksara Jawa baru yang berkembang sejak tahun 1600 hingga saat ini.

¹⁵ *Patina* pada logam disebabkan oleh aksi korosif dari bahan-bahan kimia. Barang-barang logam yang terkubur dalam tanah, air maupun tergeletak di udara terbuka ketika bersentuhan dengan udara akan mengalami oksidasi dan menyebabkan *patina* yang berwarna kehijauan. Dari nilai artistiknya, adanya *patina* merupakan suatu hal yang sangat atraktif dan dipandang sebagai keindahan (Macropaedia, 2002: 53). Ketika terkubur dalam tanah, tembaga akan kehilangan sifat logamnya. Lapisan oksidasi akan muncul meskipun tipis dan oksidasi akan melapisi tembaga dengan mineral berwarna merah keunguan yang dikenal sebagai *cuprite* yang lama kelamaan akan melapisi tembaga dengan warna hijau atau biru yang bercampur dengan *malachite* dan *azurite* yang dikenal sebagai *patina*. *Patina* ini dapat dikatakan sebagai lapisan pelindung logam bersangkutan untuk menahan korosi yang destruktif. *Patina* terbentuk secara alami dan membutuhkan waktu yang lama. *Patina* merupakan identitas spesifik dari artefak. *Patina* dapat terbentuk secara alamiah pada semua logam, terutama tembaga, kuningan dan perunggu (Plenderleith, H.J. 1956. *The Conservation of Antiquities and Works of Art: Treatment, Repair, and Restoration*, hal: 233. London: Oxford University Press; Suyono. 1982. *Metode Konservasi Peninggalan Kepurbakalaan* hal: 5. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; Nawawi, 1993: 27 catatan 1).

Aksara yang terpahat pada ke dua lempeng tembaga prasasti Muṇḍu⁰an dipahatkan miring ke arah kanan dan cenderung bulat yang merupakan ciri aksara Kawi awal (Casparis, 1975: 30). Disebutkan bahwa aksara Kawi standar berbentuk agak bulat, memiliki kuncir (*kuncir*), digoreskan dalam, dipahatkan rapi dengan jarak teratur, dan cenderung miring 15⁰. Kemungkinan besar pemahatan aksara ini diadaptasi dari tulisan yang biasanya dipakai pada daun lontar (Casparis, 1975: 28—34). Aksara yang dipahatkan memiliki tinggi 0,5 cm dengan lebar bervariasi antara 0,4 hingga 0,6 cm. Contoh aksara yang memiliki lebar terbesar adalah aksara *ya* () dan *ṅa* (). Jarak antar aksara rata-rata stabil yakni antara 0,2 hingga 0,4 mm.

Pada umumnya tanda *kuncir* dimiliki hampir oleh semua aksara dalam prasasti ini. *Kuncir* merupakan ciri huruf Jawa Kuno abad ke-8 M dan awal abad ke-9 M yang merupakan perkembangan dari bentuk persegi atau bulatan kecil yang terdapat di bagian atas dari huruf palawa. Aksara yang tidak memiliki *kuncir* diantaranya aksara *i* (), *u* (), *ṅa* (), *ṅa* (), dan *ja* (). Aksara-aksara yang memiliki tanda *kuncir* sangat banyak. Umumnya masing masing aksara hanya memiliki satu tanda *kuncir*, dan perbedaannya pada letak tanda ini. Pada aksara *ka* (), *kha* (), *ga* (), *ta* (), *bha* (), *la* () dan *śa* (), tanda *kuncir* pada bagian kanan atas aksara. Pada aksara *ka* dan *la* tanda *kuncir* hilang jika diikuti oleh tanda *patēn*. Sedangkan aksara *ḍa* (), *pa* (), *ya* (), *ṣa* () *sa* () dan *ha* () tanda *kuncir* terletak di bagian kiri atas.

Khusus untuk aksara *a* ada dua tanda *kuncir* di bagian kiri dan kanan atas aksara, *kuncir* di bagian kanan atas garis vertikal dipahatkan agak masuk ke arah kiri dalam aksara (). Sedangkan untuk aksara *wa* selalu dipahatkan *kuncir* dibagian kanan atas aksara (), tetapi terkadang tanda *kuncir* ini digantikan oleh sebuah garis horizontal yang melengkung ke bawah sehingga seolah olah menaungi aksara *wa* (). Namun ada kalanya kedua tanda ini digunakan bersamaan seperti pada kata *winaiḥ* (). Penggunaan tanda *ulu* maupun *anuśwara* sama sekali tidak berpengaruh terhadap *kuncir* misalnya pada kata *likulinā* (). Hal yang membuat kesulitan dalam pembacaan adalah kemiripan pahatan pada aksara *sa*() dan *pa* () karena keduanya memiliki

kuncir di sebelah kiri dan juga cara pemahatan kedua aksara ini sangat mirip satu sama lain. Selain itu aksara *ta* () dan *ka* () juga memiliki kemiripan terutama pada garis vertikal di tengah-tengah aksara.

Berikut beberapa ciri aksara yang telah disebutkan oleh Umar (1970):

1. tanda bunyi *i* (*ulu*) tidak selalu dituliskan dalam ukuran yang sama, kadang kadang besar kadang kadang kecil. Dalam ukuran yang besar maka ukurannya hampir sama dengan tanda bunyi *e pĕpĕt*, bedanya pada tanda *pĕpĕt* yang ada di prasasti itu ada tanda silang kecil di dalamnya. Misalnya pada baris 5 lempeng II :*syān dhani* (anda *ulu* bagi *na* dituliskan besar sekali, sedangkan pada baris yang sama*si tija* dan *si pruka*, tanda *ulunya* kecil.
2. tanda bunyi *u* (*suku*) pemasangannya tidak selalu tetap pada kaki belakang dari aksara. Misalnya pada baris 3 lempeng II: tanda bunyi *u* (*suku*) diberikan pada akhir aksara *ya*¹⁶() sedangkan pada aksara *ha* (?) diberikan pada bagian tengah.
3. pasangan *wa* tidak pula dituliskan dalam ukuran yang sama besarnya, kadang kadang besar dan kadang-kadang kecil, seperti yang terlihat pada baris 7 lempeng pertama : *sakwaiḥ* dituliskan besar sekali, sedang pada baris lima lempeng II *lamwes*, dituliskan kecil (Umar, 1970:5).

II. 4. Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam prasasti Munḍu^oan bahasa Jawa Kuno. Kalimat yang digunakan relatif pendek dan terkesan seperlunya saja. Hal ini mengingatkan kepada prasasti-prasasti dari zaman pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi kalimat selalu dibuat singkat seperti bahasa telegram sehingga kalimatnya tidak jelas. Jadi jika dibaca sesuai dengan tata bahasa Jawa Kuno dan kalimat yang sempurna harus ditambahkan kata-kata pada kalimat yang bersangkutan.

¹⁶ Dalam makalahnya, Umar (1970) tidak memberikan contoh bentuk huruf yang telah disebutkannya. Hal ini disebabkan oleh bagian sekretariat yang tidak bisa menuliskannya di atas kertas stensil.

Selain itu penggunaan aksara *a* sangat unik karena aksara ini selalu berdiri sendiri seperti pada kata *muṇḍu^oan* (), *mu^oan* (), *wadu^oa* (), dan *kapu^oa* (). Menurut Umar (1970) penulisan kata *wadu^oa* dan *kapu^oa* kemungkinan merupakan penanda bahwa prasasti ini berasal dari masa yang lebih tua dari prasasti-prasasti zaman Rakai Kayuwangi, karena penulisan kata-kata ini pada zaman Kayuwangi adalah *wadwa* () dan *kapwa* ()¹⁷.

II. 5. Penggunaan Ejaan

Susunan aksara Jawa Kuno dan Sansekerta tidaklah terlalu berbeda. Menurut Soebadio (1983: 1) susunan aksara itu terdiri atas:

1. Aksara vokal
 - a. aksara vokal tunggal: a, ā, i, ī, u, ū, e, ē, o, r, r, l
 - b. vokal ganda terdiri atas: e, ai, o dan au.
2. Aksara konsonan (velar/kerongkongan, palatal/langit-langit, domal/lidah, dental/gigi, labial/bibir). Berikut tabel perinciannya.

Tabel 2.1. Jenis aksara konsonan dan asal bunyinya.

No.	Jenis Konsonan	Asal Bunyi				
		velar	palatal	domal	dental	labial
1.	konsonan tak bersuara	k	c	ṭ	t	p
2.	konsonan tak bersuara (beraspira)	kh	ch	ṭh	ṭh	ph
3.	bunyi desis	ś	ṣ	s		
4.	Bersuara	g	j	d	dh	b
5.	bersuara (beraspira)	gh	jh	ḍh	ḍh	bh
6.	bunyi sengau	ñ	ñ	ṇ	n	m
7.	semi vokal	y	r	l	w	

¹⁷ Pada perkembangan selanjutnya jika dalam sebuah kata terdapat dua vokal yang letaknya berdampingan, maka akan berubah. Contohnya vokal *u* dan *a* yang letaknya berdampingan akan berubah menjadi ligatur *-wa* mengikuti peraturan hukum *sandhi*.

8.	Aspira	h				
9.	bunyi pertengahan (wisarga)			ḥ		
10.	bunyi pertengahan (anuswara)	m̐ / ŋ				

3. Penggunaan vokal panjang

Ada dua jenis kata bervokal panjang dalam bahasa Jawa Kuno, yaitu:

1. kata-kata bervokal panjang itu memang pada dasarnya bervokal panjang, misalnya:

sīma

dlāha

2. kata-kata bervokal panjang itu merupakan kata jadian sebagai akibat dari hukum *sandhi*, misalnya kata:

warṣātita = *warṣa* + *atita*

pāṅanugraha = *pa (ng)* + *anugraha*

Sandhi adalah gabungan dua bunyi yang bertemu sehingga menjadi satu suara. Bahasa Jawa Kuno memiliki peraturan yang mengatur penggunaan vokal baik yang sejenis maupun yang berlainan, yaitu:

$a + a = \bar{a}$

$a + u = o$

$\bar{a} + a = \bar{a}$

$a + o = u$

$a + \bar{a} = \bar{a}$

$i + a = ya$

$i + \bar{i} = \bar{i}$

$u + i = wi$

$u + \bar{u} = \bar{u}$

$o + e = \ddot{o}$

$a + i = e$

$u + a = wa$

$a + e = i$

Selain pengelompokan aksara, tanda diakritik juga memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Hasan Alwi (2005) tanda diakritik merupakan tanda tambahan pada aksara yang dapat mengubah nilai fonetis (bunyi) aksara. Tanda diakritik yang ada di prasasti Munḍu^oan adalah:

1. *wirama/patěn* ()

Tanda *wirama/patěn* merupakan tanda yang dipahatkan disamping kanan aksara berupa sebuah garis yang dipahatkan mulai dari bagian kiri atas aksara hingga jauh ke bagian bawah aksara yang agak melengkung ke arah kiri bawah aksara. Fungsi tanda ini untuk mematikan konsonan agar tidak berbunyi. Misalnya aksara *ka* yang diberi tanda *patěn* akan berbunyi ‘-k’. Contohnya pada kata:

pirak :

wđihan :

2. *wisarga* ()

Tanda *wisarga* berupa dua buah titik vertikal yang dipahatkan di sebelah kanan aksara. Tanda ini biasanya untuk bunyi konsonan perubahan atau bunyi pertengahan yang digunakan pada konsonan ‘-h’ di akhir kata. Contohnya adalah kata

ñuniwaiḥ :

ramwaiḥ :

3. *anuswara* ()

Tanda *anuswara* dipahatkan dalam bentuk titik yang diletakkan di atas aksara dan biasanya untuk bunyi konsonan perubahan *m / ŋ* (-ng) misalnya pada kata:

mu^oreṅ :

saṅ hyaṅ :

4. *ulu* ()

Tanda *ulu* berupa lingkaran yang bagian tengahnya diberi tanda silang dipahatkan di atas aksara untuk bunyi vokal ‘-ě’ (-e pĕpĕt). Pemahatan *ulu* untuk -e pĕpĕt tidak selalu besar. Contohnya pada kata:

matĕhĕř :

lamwĕř :

Jika dipahatkan tanpa tanda silang di dalamnya maka tanda ini untuk bunyi vokal ‘-i’. Pemahatan *ulu* untuk ‘-i’ tidak selalu konsisten, bisa besar atau kecil. misalnya pada kata:

kuramwit :

wiwi :

5. *Suku* ()

Tanda *suku* selalu dipahatkan secara vertikal pada bagian kanan bawah aksara. Tanda ini untuk bunyi vokal –*u*. Contohnya pada kata

guni :

muṇḍu^oan :

6. *layar* ()

Tanda *layar* dipahatkan tepat di atas aksara, bentuknya seperti aksara –*u* yang melebar. Tanda ini berfungsi untuk bunyi konsonan –*r*. Contohnya pada kata

partaya :

erbaraṅan :

II. 6. Susunan Isi Prasasti

Susunan isi prasasti menurut Hasan Djafar (2001) umumnya dimulai dengan pembukaan berupa seruan selamat atau seruan bagi dewa (*manggala*), unsur penanggalan, nama raja atau pejabat pemberi perintah, nama pejabat tinggi yang mengiringi, meneruskan dan menerima perintah, peristiwa pokok, *sambandha* atau bagian yang menyebutkan sebab suatu desa atau daerah dijadikan *sīma*, jalannya upacara penetapan *sīma*, daftar para saksi atau pejabat yang hadir, sumpah bagi siapa pun yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan penutup. Khusus mengenai sumpah, menurut Boechari (1958) pada prasasti-prasasti tua, kalimat sumpahnya singkat tetapi lama kelamaan kalimat sumpah makin luas dan menyeramkan, dengan memanggil nama-nama

dewa dan makhluk halus seperti pada prasasti Kedu 829 Ś yang berasal dari masa pemerintahan Raja Balitung.

Pada prasasti Muṇḍu^oan susunannya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak selengkap prasasti yang dikeluarkan oleh raja. Hanya beberapa unsur saja yang disebutkan dalam prasasti dimulai dengan seruan pembuka, penyebutan unsur penanggalan 728 Ś (807 M), nama pejabat pemberi perintah (Rakai Patapān Pu Manuku), nama pejabat yang menerima perintah (Sang Patoran), alasan daerah Muṇḍu^oan dan Hajihuma dijadikan *sīma*, kewajiban penduduk yang menerima anugerah *sīma*, daftar pejabat serta saksi yang datang dalam upacara penetapan *sīma* dan *pasēk pasēknya* (hadiah), diakhiri dengan nama *citralekha*¹⁸ atau penulis prasasti. Isi lempeng pertama hingga awal baris pertama lempeng kedua berisi maksud ‘pembatasan tanah’ oleh Rakai Patapān Pu Manuku dengan segala masalah dan sanksi-sanksinya, sedangkan lempeng ke dua hampir seluruhnya menyebut pejabat-pejabat serta hadiah hadiah yang diberikan (Umar, 1970).

¹⁸ *Citralekha* berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya gambar, lukisan, penulis (Zoetmulder, 1995: 177)

BAB III

ALIH AKSARA DAN ALIH BAHASA

III. 1. Alih Aksara

Lempeng 1

1. //s=was=ti¹⁹ śaka²⁰ waṣātita²¹ 728 māgha²² māsa nawami śuk=lapak=ṣa²³. ha.
°u²⁴. wr. wāra. tat=kāla rakai patapân²⁵ pu manuku²⁶ sumusuk²⁷ ni[ka]²⁸

¹⁹ Aksara *sa* dipahatkan mirip seperti aksara *u* pada abjad modern. Aksara ini memiliki tanda *kuncir* yang dipahatkan di bagian kiri atas agak menurun ke arah kanan dalam aksara. Sedangkan bagian kanan atas aksara dipahatkan agak masuk ke dalam ().

²⁰ Tanda *kuncir* pada aksara *ka* selalu dipahatkan di bagian kanan atas aksara. Tanda *kuncir* akan dihilangkan ketika aksara ini menjadi akhiran yang ditandai dengan tanda wirama, misalnya pada kata *sumusuk* () dan *pirak* ().

²¹ Aksara *wa* dipahatkan berbeda-beda baik dari segi ukuran maupun penggunaan tanda *kuncir*. Ada kalanya aksara ini dipahatkan besar, tetapi ada juga yang dipahatkan kecil. Bentuk umum aksara ini persegi, terkadang dipahatkan agak cembung di bagian garis horizontal atas aksara. Aksara ini selalu dipahatkan bersama tanda *kuncir* yang biasanya diletakkan di bagian kanan atas aksara (). Tanda *kuncir* ini ada juga yang digantikan oleh garis horizontal berbentuk agak cembung memayungi aksara (). Contoh penggunaan *wa* ‘berpayung’ dengan *wa* biasa dapat

ditemukan pada kata *winduwindu* () pada baris ke-4 lempeng pertama. Sedangkan

contoh pemakaian aksara *wa* ‘berpayung’ yang digabung dengan tanda *kuncir* ada pada kata *warṣa* (). Selain itu, ada tanda layar (untuk bunyi *r*) yang bentuknya berbeda dibandingkan tanda layar yang biasa digunakan dalam prasasti ini. Tanda ini mirip seperti tanda *wirama*, dipahatkan mulai dari bagian kiri atas aksara dan berhenti tepat di bagian kanan bawah aksara dengan catatan bagian kiri atas tanda ini melengkung ke atas. Hal ini disebabkan karena bergabungnya tanda layar dengan *ā*.

²² Aksara ini keadaannya sudah aus, namun dapat dipastikan bahwa itu aksara *mā* ().

²³ Aksara *la* sebagai ligatur *ka* pada kata *sukla* () dipahatkan mulai dari kaki kanan bawah aksara *ka* yang ditarik ke arah kiri. Sedangkan ligatur *ṣa* pada kata *pakṣa* () dipahatkan mulai dari kaki tengah aksara *ka* kemudian ditarik garis ke bawah sehingga membentuk ‘perut’ seperti pada aksara ‘d’ modern.

²⁴ Penggunaan tanda (°-) dimaksudkan untuk menerangkan aksara-aksara vokal yang dipahatkan mandiri (berdiri sendiri) seperti aksara °a (), °i (), dan °u ().

²⁵ Khusus untuk aksara *pā* tanda bunyi *ā* (*a* panjang) mirip seperti tanda *layar* yang menaungi aksara (). Dimulai dari bagian kiri atas dan berakhir dibagian kanan bawah aksara. Selain aksara *pā*, aksara yang tanda [*ā*]nya mirip adalah aksara *hā* ().

²⁶ Pahatan tanda *suku* pada aksara ini ada yang diletakkan di bagian kaki sebelah kanan bawah—misalnya pada kata *manuku* (), namun ada pula yang dipahatkan di bagian kaki tengah seperti pada kata *kuramwit* (). Pada pahatan tanda *ulu* selalu ada sedikit jarak yang memisahkan tanda ini dengan aksara *ka*-.

²⁷ Aksara ini tidak jelas karena permukaan tempat aksara dipahatkan sudah rusak (tidak rata) sehingga agak menyulitkan pembacaannya, tetapi masih terlihat agak jelas aksara *su*. Tanda *suku* pada aksara *sa* biasanya dipahatkan di kaki kanan bawah aksara miring ke arah kiri. Pahatan aksara ini sudah tidak jelas sama sekali namun Umar membaca aksara ini sebagai *k*. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya tanda *wirama* sehingga akan membentuk satu kata jika dihubungkan dengan tiga *suku* kata sebelumnya, yakni kata *sumusuk* yang bermakna ‘membatasi, menandai’. *Sumusuk* berasal dari kata dasar *susuk* yang mendapatkan sisipan *-um*. Kata *susuk* berarti batu suci untuk menjadi *sīma*. Pemahatan tanda *suku* tidaklah selalu konsisten,

2. naṅ l=maḥ °i muṅ=ḍu°an²⁹ mu°aṅ °i haji huma. sad=maknira³⁰ °i wadu°ā³¹ nira saṅ³² patoran. bu°at=haj=yan=ya mak=mitana wiwi³³ ram=waiḥ yamak³⁴ ---
3. lu°ani³⁵ kuram=wit³⁶ saṅ h=yaṅ taṅ=ḍa patapān °i d=lāha³⁷ niṅ d=lāha. ṅaran=yan³⁸ pak=mitan wiwi saṅ mad=mak. dadiya magawai pomaha[n³⁹]
4. °i win=du win=du nikananṅ l=maḥ. yāta⁴⁰ pras=tāwan=yan⁴¹ °i walawin=du ṅaranikananṅ pomahan=ya. matēhēr⁴² ya inanugrahān tanka

ada yang dipahatkan langsung dengan aksara—misalnya pada kata *sumusuk* ()—ada juga yang dipahatkan secara terpisah dengan aksara—misalnya pada kata *sukhāduḥ*[*kha*] ().

²⁸ Aksara *na* terletak ditepi kanan lempeng pertama, tanda *ulu*-nya tidak kelihatan jelas karena bagian tepi kanan lempeng ini hilang. [*ka*] sengaja diberi tanda kurung karena aksara rusak, namun berdasarkan aksara setelahnya maka bagian yang rusak ini seharusnya aksara *ka*.

²⁹ Dalam alih aksara digunakan lambang °*a* sebagai penanda bagi aksara *a* yang berdiri sendiri. Dalam prasasti ini penggunaan aksara *a* yang berdiri sendiri cukup banyak. Menurut Umar (1970) hal ini menandakan bahwa prasasti ini berasal dari masa yang lebih tua dari pemerintahan *Rakai Kayuwangi* (856-882 M). Namun dalam alih aksarannya, Umar tetap memakai *a* biasa meskipun bagi aksara *a* yang berdiri sendiri. Pemahatan tanda *kuncir* pada aksara ini selalu berada di bagian kiri atas aksara dan biasanya tidak langsung menyambung melainkan ada sedikit jarak.

³⁰ Umar membaca aksara ini *pang-*, seharusnya dibaca *sa-* karena tidak terlihat tanda *anuswara*.

³¹ Umar membaca aksara ini sebagai *a* biasa, seharusnya *a* panjang (°*ā*) karena ada tambahan garis vertikal di sebelah kanan yang menandakan bahwa aksara ini harus dipanjangkan.

³² Tanda *anuswara* biasanya dipahatkan di bagian tengah aksara, namun tidak tertutup kemungkinan tanda ini dipahatkan pada bagian kanan atau kiri atas aksara, misalnya pada kata *sang palindu*°*a* ().

³³ Untuk aksara *wa* yang dipahatkan bersama dengan tanda *ulu*, tanda *kuncir* tidak dihilangkan. Biasanya tanda *kuncir* dipahatkan dibagian kanan bawah tanda *ulu* (ada yang dipahatkan bersambung dengan tanda *ulu* ada juga yang terpisah). Contohnya pada kata *wiwi* () di baris ke-2 lempeng pertama dan di baris ke-3 lempeng pertama, antara tanda *ulu* dan tanda *kuncir* dipahatkan bersambung ().

³⁴ Tanda *suku* pada aksara *ka* tidak kelihatan jelas Umar membacanya sebagai *ku*.

³⁵ Umar membaca aksara ini sebagai *luani*(*ng*) padahal tidak ada tanda *anuswara* di sekitar aksara *na*. Pembacaan yang seharusnya adalah *luani*.

³⁶ Tanda *ulu* untuk membunyikan *i* dipahatkan menyambung dengan tanda *suku* (untuk bunyi *u*), pada kata *Muṅduan* yang tepat berada di atasnya. Aksara *ta* memakai tanda *kuncir*—meski kecil—sekalipun ada tanda *wirama* yang mematikan aksara ini sehingga berbunyi *t* saja ().

³⁷ Aksara ini seperti aksara *ṅa* () tetapi kata yang seharusnya dipahat disini adalah *dlāha*. Kemiripan ini disebabkan oleh adanya penambahan garis vertikal pendek di samping kanan atas aksara *da* ().

³⁸ Aksara *ṅa* () hampir mirip dengan aksara °*u* () atau *da* () dengan tambahan tanda *kuncir* di bagian kanan atas aksara. Garis pada punggung kiri aksara disambung secara langsung,

seperti pada kata *ṅaranyan* (), *ṅaranikananṅ* (); namun ada juga

yang dipisah seperti pada kata *paṅanugraha* () pada baris 7 lempeng pertama.

³⁹ Aksara ini hilang. Diperkirakan aksara yang selanjutnya adalah *na* yang diikuti tanda *wirama* sehingga membentuk kata *pomahan*. *Pomahan* berasal dari kata dasar *umah* yang berarti ‘rumah’. Perincian dari kata ini adalah *pa-* + *umah* + *-an*.

⁴⁰ Aksara ini seharusnya dialihaksarakan sebagai *yā* (dengan *a* panjang) tetapi Umar mengalihaksarakannya sebagai *ya-* tanpa memperhatikan garis vertikal yang menyambung dengan aksara *ya* yang terletak di sebelah kanan aksara ().

5. tamāna deniṅ⁴³ °eṛbaraṅ⁴⁴. mu^oaṅ saprakâraṅ⁴⁵ mañilala saparân=ya⁴⁶
 madu^oal maw=li. ñuniwaiḥ yan hana sukhaduḥ[kha]
6. n=ya °ityewamādi⁴⁷ tankatamâna °ataḥya. nahan pañanugraha rakai patapân pu
 manuku °i wadu°ānira [saṅ pato]
7. ran mu^oaṅ °i sak=waiḥ nikananṅ °umuñ=gu⁴⁸ rikananṅ °i walawin=du. yāpu^oan
 hana °umulah °ulah °ike⁴⁹ pañanugraha d=[lahā niṅ]

Lempeng 2

1. ...[d]=lāha pañ=ca⁵⁰ mahāpātaka pañ=guhan=ya. patih^oi patapân rikananṅ kāla.
 kayum=wuñan saṅ rup=yan. mant=yasiḥ wadu^oā⁵¹ rakai
2. patapân saṅ paliṅ=du^oa. paṛtaya saṅ pagēh⁵² kapu^oa⁵³ winaiḥ pasak=pasak pirak
 dhā 1 w=ḍihan yu 1 so^oaṅ so^oaṅ la....

⁴¹ Umar melakukan kesalahan pada alihaksara *sta*, ia tidak memperhatikan adanya garis vertikal kecil disebelah kanan aksara *sa* (). Seharusnya dialihaksarakan sebagai *stā*.

⁴² Di atas aksara *ta* ada tanda *ulu* yang di dalamnya diberi tanda silang untuk membunyikan *ě* (*e pēpēt*). Umar tidak memperhatikan hal ini atau mungkin ia lupa karena tanda ini sangat mencolok. Alasan lainnya ia menggunakan *e* untuk *ě* (*e pēpēt*). Atau dapat juga disebabkan oleh pengetik naskah pada Seminar *Sejarah Nasional Indonesia II* yang lupa memberikan tanda lengkung di atas aksara *e*, atau mesin ketiknya tidak mempunyai huruf *ě pēpēt*.

⁴³ Seharusnya alih aksara untuk *suku* kata ini adalah *de* biasa tetapi Umar menggunakan *é*, Padahal tidak ada tanda *ulu* di atas aksara *da*, sebagai gantinya ada sebuah garis vertikal yang melengkung ke arah kanan (ke dalam) di sebelah kiri aksara *da* (). Lihat catatan 24.

⁴⁴ Umar menggunakan *é* dalam transkripsinya, seharusnya *°e* karena aksara ini berdiri sendiri. *r* berupa tanda *layar* yang umum digunakan, dipahatkan melengkung (cekung) di atas aksara *ba* dimana bagian sebelah kanannya disambung langsung dengan tanda *kuncir* yang mengikuti aksara *ba* ().

⁴⁵ Umar membaca kata ini *saprakara*. Alih aksara yang seharusnya adalah *saprakarā*.

⁴⁶ Umar membacanya *saparanya*, seharusnya *saparānya* karena *ra* seharusnya dipanjangkan.

⁴⁷ Aksara ini dipahat sebagai *ityewamādi*. Seharusnya *ityéwamādi* seperti yang dilakukan Umar. Pembentukan kata ini berasal dari kata *iti*+ *ewam* + *adi*.

⁴⁸ Umar membaca kata ini sebagai *umungga*, seharusnya adalah *°umuñgu* karena di bawah ligatur *ga* ada tanda *suku* yang pemahatannya diberi sedikit jarak dengan ligatur *ga*. Pemahatan tanda *suku* biasanya diletakkan di kaki kanan bawah aksara ini dan ada sedikit jarak yang memisahkannya, misalnya seperti pada kata *°umuñgu* () dan *guni* (); sedangkan pada kata *pañguhanya*, tanda *suku* dipahatkan bersambung secara langsung dengan ligatur *ga*. *Umunggu* berasal dari kata *unggu* yang berarti 'tinggal'. Kata ini mendapat sisipan *um* sehingga berbunyi *umunggu*.

⁴⁹ Kata ini mengalami pelesapan karena hukum *sandhi*. Kata ini berasal dari kata *ika* + *i*. Seharusnya alih aksara untuk kata ini adalah *ike* dengan *e* biasa, tetapi Umar menggunakan *é*, Padahal tidak ada tanda *ulu* di atas aksara *ka*, sebagai gantinya ada sebuah garis vertikal yang melengkung ke arah kanan (ke dalam) di sebelah kiri aksara *ka*. Lihat catatan 24.

⁵⁰ Umar mengalihaksarakan kata ini sebagai *panca* seharusnya *pañca* karena aksara itu bukan aksara *na* () tetapi *ña* ().

⁵¹ Umar mengalihaksarakan aksara ini dengan *a* biasa, padahal aksara ini berdiri sendiri dan memiliki sebuah garis vertikal disamping kanan atas sehingga alih aksara untuk aksara ini *°ā*.

⁵² Umar membaca kata ini *pageh* () seharusnya *pagēh* ().

3. [ṅ=ḍaka]⁵⁴ °eṛbaraṅṅan pirak mā 8 w=ḍihan yu 1 so°añ so°añ.wahuta p=ṭir paṅ=ḍak=yan pirak dhā 1 w=ḍihan yu 1 so°añ
4. so°añ. pituṅtuṅn=ya 5 pirak mā 5 so°añ so°añ. ramā i muṅ=ḍu°an si⁵⁵ bunā. kalima si pruka. juru mu°re⁵⁶ siklat. pa
5.sikulinā. ḍaṅ=ḍa mu°reṅ s=yan=ḍani. kaṅ=ḍaṅṅan⁵⁷ lam=wēs⁵⁸ si tija. kalima °i hajihuma si sruwa. juru si ni. parwuwu[s]
6.maṅ=ḍeṛparaṅ⁵⁹ si guṅi⁶⁰. °ikana kabaiḥ kapu°a winaiḥ pasēk=pasēk⁶¹ pirak w=ḍihan kayānurupa. sumurata
7.ma prasas=ti citralekha⁶² rakai⁶³ patapān saṅ minaṅa winaiḥ pirak mā 8 w=ḍihan yu 1 //

III. 2. Alih Bahasa

Lempeng I

1. //Selamat! tahun Śaka⁶⁴ telah berlalu 728⁶⁵, hari Kamis⁶⁶ Legi (hari pasaran ke-5)⁶⁷ hari ke-2 minggu yang 6 hari⁶⁸, hari ke-9 pada bagian paruh terang bulan maghā⁶⁹. ketika Rakai Patapān Pu Manuku membatasi tanah di

⁵³ Di bagian kiri atas aksara *ka* ada tanda *anuswara* yang letaknya berdampingan dengan tanda *wisarga*. Seharusnya, tanda *anuswara* ini tidak ada karena kata (*kapu°a*) sudah benar. Hal ini murni kesalahan *citrlekha*.

⁵⁴ Sebenarnya pembacaan ini hanya perkiraan saja karena aksara-aksara di awal baris tiga lempeng 2 ini saling tumpang tindih sehingga tidak jelas.

⁵⁵ Tanda *ulu* biasanya selalu diphatikan pada bagian atas tanda tanda *kuncir* misalnya pada nama *si tija* ().

⁵⁶ Aksara vokal °*re* tidak memiliki kuncir, pahatan aksara merupakan gabungan *pa* dan *ga*. Bagian atas diphatikan seperti ladam kuda (). Pada kata *mu°reṅ* di baris 5 vokal °*re* diphatikan memiliki kuncir di bagian kiri atas aksara mirip seperti *pa* ().

⁵⁷ Umar mengalihaksarakan kata ini sebagai *kandangan* seharusnya adalah *kaṅḍaṅṅan* karena tidak ada aksara *na* melainkan *ṅa* yang berligatur dengan *ḍa*.

⁵⁸ Tidak ada penanda vokal *e* di sebelah kiri aksara *ma*, sebagai gantinya tanda *ulu* yang disilang ditengahnya ().

⁵⁹ Umar membaca kata ini *maṅḍerparang*, seharusnya *maṅḍerparang* dengan *ṅa* domal/lidah.

⁶⁰ Umar membaca ini sebagai *guni* () seharusnya *guṅi* (dengan *ṅa* domal/lidah) ().

⁶¹ Kata ini memang harus dibaca sebagai *pasēkpasēk*, namun di baris dua lempeng dua, *citrlekha* prasasti membuat kelalaian dengan tidak memhatikan tanda *ulu* sehingga kata *pasēkpasēk*

() dipahat dan dibaca sebagai *pasakpasak* ().

⁶² Umar membaca *citrlekha*.

⁶³ Aksara *ka* pada kata *rakai* di baris pertama tidak menggunakan tanda *kuncir* (), sedangkan aksara *ka* pada kata yang sama di baris 6 lempeng pertama dan kata *rakai* di baris 7 lempeng dua menggunakan tanda *kuncir* ().

2. (wilayah) Munḍu^oan dan juga di Haji Huma sebagai hadiah kepada wadu^onya Saṅ Patoran⁷⁰ dengan kewajiban kepada raja untuk memelihara kambing. Itu asal usulnya diberi hadiah
3. lamanya [anugerah] yang dimiliki saṅ hyaṅ taṅḍa patapān hingga akhir zaman. namanya memelihara kambing dari yang menerima hadiah. maka dibuatlah perumahan
4. di wilayah windu windu. itulah alasan mengapa tanah di walawindu yang disebut tempat tinggalnya. lalu anugerah tersebut
5. tidak boleh dimasuki oleh *erbaraṅan*. lebih-lebih lagi juga [oleh] segala jenis *maṅilala (drwya haji)*. segala jenis jual beli lebih-lebih jika ada pelanggaran

⁶⁴ *Śaka* adalah nama tahun dalam sistem penanggalan prasasti di Indonesia, terutama di Jawa. Tahun *śaka* dihitung berdasarkan perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Satu tahun *Śaka* lamanya 12 bulan dimana masing masing bulan terdiri dari 30 hari (Wurjantoro, 1995: 171). Antara tahun *Śaka* dan tahun Masehi ada selisih 78 tahun sehingga jika ingin mengintegrasikan tahun *Śaka* ke tahun Masehi maka tahun *Śaka* yang berjalan harus ditambah 78 atau 79 (Casparis, 1975: 47).

⁶⁵ Umar (1970) membaca angka tahun dari prasasti ini 748 Ś, sedangkan Nakada (1982), Boechari (1993) dan Darmosoetopo (2003) membaca angka tahun prasasti ini 728 Ś. Umar di dalam makalahnya masih meragukan pembacaan angka puluhan, namun berdasarkan tabel angka Damais (1990), angka 4 bukan seperti yang ada di prasasti ini. Angka 2 memiliki perkembangan yang konsisten dan memiliki perubahan yang tidak terlalu mencolok. Angka 2 sangat mirip dengan yang ada di Prasasti Munḍu^oan, ada di prasasti Kayumwungan/Karang Tengah 746 Ś dan prasasti Mangulihi B (792 Ś).

⁶⁶ *Saptawāra* (siklus 7 hari) terdiri atas *Āditya* (Minggu), *Soma* (Senin), *Anggara* (Selasa), *Budha* (Rabu), *Wṛhaspati* (Kamis), *Śukra* (Jumat), *Śanaiścara* (Sabtu) (Casparis, 1978: 3).

⁶⁷ *Pañcawāra* (siklus 5 hari) terdiri atas *pahing (pa)*, *pon (po)*, *wagai (wa, wage)* pada saat ini, *kaliwuan (ka, kliwon)* dan *umanis (u/ma, legi)* yang mewakili ke empat (dan lima di tengah sebagai pusat) arah mata angin dengan perwakilan dewa serta warna yang berbeda-beda, yakni:

No.	Nama <i>Pañcawāra</i>	Warna	Arah mata angin	Dewa yang mewakili
1.	<i>Pahing</i>	Merah	Selatan	Brahma
2.	<i>Pon</i>	Kuning	Barat	Mahādewa
3.	<i>Wagai (wage)</i>	Hitam	Utara	Wiṣṇu
4.	<i>Kaliwuan (kliwon)</i>	Campuran	Tengah	Śiwa
5.	<i>Umanis (legi)</i>	Putih	Timur	Iśwara

Sumber: L.C Damais. 1995: 110-164

⁶⁸ Siklus hari penulisannya berurutan dari *sadwāra* (siklus 6 hari) , *pañcawāra* (siklus 5 hari), *saptawāra* (siklus 7 hari). *Pañcawāra* dan *sadwāra* merupakan perhitungan hari yang tidak dipengaruhi oleh sistem penanggalan India, dan daerah lain di Indonesia. Jika ketiga siklus dikombinasikan (6 x 5 x 7), akan menghasilkan siklus 210 hari. *Sadwāra* terdiri atas *tunglai (tu)*, *haryang (ha)*, *wurukung (wu)*, *paniruan (pa)*, *was (wa)*, dan *mawuku (ma)* (Casparis, 1978: 2--3).

⁶⁹ *Maghā* merupakan nama bulan yang mewakili bulan Januari-Februari dalam penanggalan modern. Awal tahun saka dimulai pada bulan Caitra. Dalam tahun *Śaka* ada 12 bulan yakni: *Caitra* (Maret-April), *Waiśakha* (April-Mei), *Jyeṣṭha* (Mei-Juni), *Āṣāḍha* (Juni-Juli), *Śrāwāṇa* (Juli-Agustus), *Bhadrawāda* (Agustus-September), *Aśuji* (September-Oktober), *Kārttika* (Oktober-November), *Mārgaśira* (November-Desember), *Poṣya* (Desember-Januari), *Maghā* (Januari-Februari), dan *Phālguna* (Maret-April) (Damais, 1990: 11).

⁷⁰ Umar menterjemahkan 'dalam wilayah Sang Patoran'. Seharusnya 'hadiah kepada wadu^a (pembantu atau wakilnya) [yang bernama] Sang Patoran.

6. nya dan sebagainya itu tidak boleh masuk. kemudian pemberian anugerah oleh Rakai Patapān Pu Manuku kepada wadu^oa [yang bernama] Sang Pato
7. ran juga kepada semua yang tinggal di walawindu. jika kelak ada yang merubah anugerah ini

Lempeng II

1. (akan menemui) lima bencana besar (*pañca mahāpātaka*)⁷¹ (ketentuan *sīma* ini akan berlangsung) hingga akhir zaman. pejabat patih di Patapān saat itu (berasal) dari Kayumwuān (bernama) Saṅ Rupyān, (dari) desa Mantyasih adalah wadu^oa Rakai
2. Patapān (bernama) Saṅ Palindu^oa, (lalu) partaya (bernama) Saṅ Pagēh masing masing semuanya diberi hadiah berupa uang 1 *dhārana*⁷² perak dan sepasang kain.

⁷¹ Dalam prasasti-prasasti tua kalimat sumpah itu singkat tapi makin lama semakin banyak dan menyeramkan yang dimulai sejak prasasti masa Balitung (Prasasti Kedu, 829 Ś).

⁷² *Dhārana* atau biasa disingkat *dhā* merupakan satuan ukuran khusus untuk uang perak. 1 *dhārana* perak memiliki berat 38,601 gram. Urutan berat perak tertinggi adalah *kāti* (*kā*), *dhārana* (*dhā*) dan *māsa* (*mā*). Adanya keterangan mengenai urutan ini pertama kalinya ditemukan dalam prasasti Kurungan (885 M) yang menyebutkan bahwa Dang Acarrya Munindra membeli sawah milik para *rāma* di Parhyangan dengan harga 1 *kāti* perak dan juga ada biaya lainnya berupa pasak pasak 3 *dhā*, melunasi hutang 7 *dhā*, *pisungsung* 1 ekor kambing yang dihargai 4 *mā*. Selain di prasasti Kurungan, urutan penyebutan yang sama juga ada di prasasti Lintakan (919 M). Sedangkan penyebutan *kupang* setelah *mā* ada di prasasti Tihang (914 M) yang menyebutkan mengenai banyaknya pajak *tuhales* sebesar pirak *mā* 1 *ku* 1 (Darmosoetopo, 2002: 185—6).

Tabel 3.1. Urutan nama satuan berat perak dan persamaannya

<i>kā</i>	<i>dhā</i>	<i>mā</i>	<i>ku</i>	Keterangan
1	32	512	2248	
	1	16		
		1	4	
617,610	38,601	2,412	0,603	Gram Sekarang

Menurut Stutterheim (1940: 31) perbandingan setiap satuan itu adalah 1 *kāti* = 16 *dhā* = 256 *mā* sehingga 1 *dhā* = 16 *mā*. Berat masing-masing satuan ialah:

$$\begin{aligned} 1 \text{ kāti} &= 0,61761 \text{ kg} \\ 1 \text{ dhā} &= 00,03861 \text{ kg} \\ 1 \text{ mā} &= 0,002414 \text{ kg.} \end{aligned}$$

Mengenai perbandingan *kā* dengan *dhā* belum ada dalam sumber prasasti. Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan pakar. Boechari (Poesponegoro, ed. 1993: 143) menyatakan bahwa perbandingan *kā* dan *dhā* adalah 1 : 32. Sedangkan Jones (1984: 145) menyatakan perbandingan *kā* terhadap *dhā* adalah 1 : 44.

Selain *dhārana* (*dhā*), dikenal juga istilah *mā* atau *māsāka* (skṛt) yang merupakan satuan ukuran khusus untuk perak dan emas. Satuan ukuran *mā* hanya dipergunakan oleh prasasti-prasasti yang berasal dari masa Jawa Kuno awal, sedangkan satuan ukuran *māsaka* lebih banyak dipakai pada prasasti prasasti dari masa yang lebih akhir terutama prasasti dari Bali. Urutan satuan berat emas adalah *kā* (*kāti*)—*su* (*suwarna*)—*mā* (*māsa* atau *māsaka*)—*ku* (*kupang*)—*hā* (*hatak*)—*sā* (*sāga*) (Darmosoetopo, 2003: 181-184).

3. *ṅḍaka erbaraṅan* masing masing mendapatkan 8 *māsa* uang perak dan sepasang kain. *wahuta pṭir* di desa pandakyan masing masing (mendapat hadiah) 1 *dhārana* uang perak dan sepasang kain.
4. *pituntunṅnya* ada 5 orang masing masing (mendapat hadiah) 5 *māsa* uang perak. kepala desa di Muṅḍu^oan (bernama) si Buna, *kalima* (bernama) si Pruca, *juru mu^ore* (bernama) si Klat pa
5. ----- (bernama) si Kulina, *ḍaṅḍa mu^oreṅ* bernama si Andani, (pejabat di) kaṅḍaṅan lamwēs (bernama) si Tija dan Kalima, (pejabat di) Haji Huma (bernama) si Sruwa, *juru* (bernama) si Ni, (pejabat) *parwuwus*
6. ----- *manderparang* (bernama) si Guni. itu semuanya sama-sama diberi hadiah berupa uang perak dan kain jenis *kayanurupa. sumurata*
7. ----- juru penulis (*citralkha*) prasasti Rakai Patapān bernama sang Minaṅa diberi 8 *māsa* uang perak dan sepasang kain.//

Tabel 3. 2. Urutan nama satuan berat emas dan persamaannya

Nama Satuan					Keterangan
kā	su	mā	ku	sā	
1	20	320	1280	7680	
	1	16	64	384	
		1	4	24	
			1	6	
754,667	39,569	2,473	0,618	0,102	
					Gram sekarang

(Sumber: Darmosoetopo, 2003: 184).

Menurut Stutterheim (1940: 17, 31) 1 *suwarna* = 1 *tahil* = 16 *māsa* = 64 *kupang* dengan berat masing-masing:

1 *suwarna* = 0,038601 kg
 1 *māsa* = 0,002414 kg
 1 *kupang* = 0,000603 kg

Adapun menurut Wicks (1992: 252-253, Darmosoetopo, 2003: 182) berat 1 *surwarṅa* = 38, 601 gram; 1 *māsa* = 2,414 gram; 1 *kupang* = 0,603 gram.

Christie dalam survei permulaan tentang mata uang Jawa Kuno, mengkaji perbandingan dan berat masing-masing satuan dengan hasil:

1 *kāṭi* = 20 *suwarṅa* = 20 *tahil* = 750-768 gram

1 *suwarṅa* = 16 *māsa*

1 *māsa* = 4 *kupang* = 2,4 gram

1 *kupang* = 0,6 gram (Christie, tulisan lepas; Darmosoetopo, 2003: 182-183).

BAB IV

ANALISIS

Bab ini berisi analisis dari seluruh aspek prasasti Munḍu^oan baik secara fisik maupun isi. Kritik sumber merupakan metode pengolahan data untuk mengetahui dan menguji otentisitas suatu prasasti sehingga layak menjadi data sejarah. Prasasti Munḍu^oan merupakan sumber utama dari penelitian sehingga harus diuji melalui kritik sumber dengan dua cara yakni kritik ekstern yang meliputi pengujian bahan tempat prasasti dipahatkan, paleografi aksara, dan kronologi ; serta kritik intern yang merupakan pengujian bahasa dan isi prasasti yang menyangkut kata, kalimat dan wacana.

IV. 1. Unsur Fisik

IV. 1. 1. Ukuran, Bahan dan Bentuk

Dua buah lempeng tembaga prasasti Munḍu^oan berbentuk segi empat yang sudah tidak utuh lagi. Lempeng tembaga prasasti Munḍu^oan berwarna coklat kemerahan yang menunjukkan bahwa tembaga merupakan logam yang lebih dominan dibandingkan campuran logam lainnya dalam pembuatan lempeng tembaga prasasti Munḍu^oan. Ukuran kedua lempeng tembaga ini tidak sama panjangnya namun memiliki lebar yang sama yakni 9,5 cm. Panjang lempeng pertama adalah 32, 2 cm, sedangkan panjang lempeng ke dua adalah 31, 8 cm.

Prasasti-prasasti logam pada awal abad ke-9 M sangat sedikit. Prasasti Garung berangka tahun 829 M telah hilang, namun diketahui ukuran prasasti ini adalah 24,5 x 12,7 cm. Prasasti-prasasti tembaga dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi memiliki ukuran panjang tidak lebih dari 40 cm dengan lebar bervariasi. Prasasti Mulak I (878 M) berukuran 36 x 22, 5 cm, prasasti Kwak I (879 M) berukuran 36 x 6,5 cm dan prasasti Ratawun I (881 M) berukuran 34 x 6,5 cm. Prasasti tembaga dari masa Rakai Balitung misalnya prasasti Taji (901 M) yang berjumlah 4 lempeng memiliki ukuran panjang yang bervariasi antara 47 hingga 49 cm dan lebar yang juga bervariasi antara 14,5 hingga 15 cm; prasasti Mantyasih III berukuran 45 x 19 cm. Dilihat dari perbandingan ukuran prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Rakai Garung maupun Rakai Kayuwangi dan Rakai Balitung, dapat disimpulkan bahwa ukuran panjang dan lebar yang

berbeda pada lempeng tembaga suatu prasasti adalah hal umum seperti halnya dalam prasasti Taji.

Prasasti Muṇḍu^oan dipahatkan pada 2 lempeng tembaga. Berdasarkan daftar prasasti yang dibuat oleh Damais (1990) hampir semua prasasti yang berangka tahun pada masa awal sejarah di Jawa Tengah dibuat dari batu. Sangat jarang sekali prasasti yang dibuat dari tembaga. Selama ini, prasasti yang dibuat dari tembaga adalah prasasti Garung (Penggung) yang berangka tahun 741 Ś (829 M) dan dikeluarkan oleh Rakarāyān i Garung. Kemudian prasasti berangka tahun 842 M yaitu prasasti Kuṭi dikeluarkan oleh Śrī Mahārāja Śrī Lokapala Hariwangśottunggadewanāmarājābhiṣeka. Dari hasil pembacaan, ternyata prasasti ini adalah prasasti *tinulad* (Nakada, 1982: 76-77; Damais, 1990: 92-93).

Keadaan prasasti Muṇḍu^oan secara umum masih sangat baik sekali. Kemungkinan karena prasasti ini dipahatkan pada lempeng tembaga. Ketebalan lempeng tembaga prasasti Muṇḍu^oan 1 mm. Pada lempeng pertama ketebalan prasasti merata, sedangkan pada lempeng ke dua ketebalan prasasti tidak merata seluruhnya terutama di bagian tepi kiri dan kanan keropos. Pahatan aksara lempeng pertama tidak sedalam pahatan aksara lempeng ke dua. Kedalaman pemahatan aksara pada lempeng kedua ini, membuat lempeng tembaga berlubang. Contohnya pahatan bagian kaki pasangan *-la* pada suku kata *dlāha* di baris pertama. Selain itu, bagian punggung aksara *da-* juga berlubang. Contoh lainnya pahatan pasangan *-da* pada kata *maṇḍerparaṇ* di awal baris ke enam, *-na* pada kata *wḍihan* serta aksara *-o* pada kata *so^oaṇ* [*soaṇ*] di akhir baris ketiga serta pasangan *-la* pada kata *si klat* di baris ke empat (lihat lampiran).

IV. 1. 2. Paleografi

Paleografi adalah studi yang mempelajari jenis, bentuk dan perkembangan tulisan kuno yang dituliskan baik di atas bahan-bahan yang lunak atau lentur seperti kain, kulit kayu dan lontar, maupun yang dipahatkan di atas bahan yang

keras seperti batu, logam, kayu dan tanah liat⁷³. Tinjauan ini berguna untuk mengenal bentuk dan gaya aksara yang dipahatkan pada logam. Casparis (1975) menyebutkan aksara Kawi standar berbentuk agak bulat, dipahat dengan *kuncir* (*serif*), dalam, rapi dan memiliki jarak yang teratur, serta cenderung miring 15⁰.

Aksara yang dipahatkan di prasasti Munḍu^oan merupakan jenis aksara Jawa Kuno awal yang berkembang sejak tahun 750-925 M (Casparis, 1975: 28-33). Namun pada prasasti Munḍu^oan, kemiringan prasasti ini tidak mencapai 15⁰ karena aksaranya dipahat lebih tegak. Dilakukan perbandingan aksara prasasti Munḍu^oan dengan prasasti lain misalnya prasasti Huwung (822 M), prasasti Kayumwungan (824 M), prasasti Tri Tepusan II (842 M) dan prasasti Tulang Air I (850 M), yang semuanya prasasti dituliskan di atas batu dan disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D.19, D. 27 dan D. 34, D. 39 serta D. 7.

Prasasti yang angka tahunnya dekat dengan prasasti Munḍu^oan yakni prasasti Huwung dan prasasti Kayumwungan, dipahatkan dengan aksara Jawa Kuno standar. Hampir semua ciri-ciri aksara prasasti Munḍu^oan ada di prasasti Kayumwungan dimulai dari pahatan tanda *wirama*, ligatur, *kuncir*, *ulu*, *suku* dan *layar*. Pada prasasti Huwung, pahatan aksaranya renggang sehingga mudah untuk diamati; pahatan aksaranya agak berbeda terutama aksara *ma* dan *la*. Perbedaan yang paling mencolok antara prasasti Munḍu^oan, prasasti Kayumwungan dan prasasti Huwung adalah pahatan aksaranya; pahatan aksara prasasti Munḍu^oan lebih tegak dibandingkan dengan kedua prasasti ini. Selain itu, bentuk aksara prasasti Munḍu^oan juga lebih menyerupai kotak dengan perbandingan antara tinggi aksara dengan lebar aksara seimbang.

Dari perbandingan dengan prasasti Tri Tepusan dan prasasti Tulang Air, aksara prasasti Tulang Air lebih mirip dengan aksara prasasti Munḍu^oan dengan bentuk Kawi standar serta pahatan aksara yang lebih tegak jika dibandingkan dengan pahatan aksara prasasti Huwung, prasasti Kayumwungan, prasasti

⁷³ Prasojo, Tjahjono. 1991. "Kecenderungan, Arah dan Prospek Studi Paleografi Klasik di Indonesia", *PIA VI* buku 1 hal 48. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Wayuku (854 M) atau prasasti Śiwagṛha (856 M). Aksara prasasti Tri Tepusan dipahatkan lebih ‘bulat’ dengan sudut yang tak kelihatan jelas.

Pada sub-bab bentuk aksara di bab dua telah disebutkan bahwa aksara yang ada pada prasasti Muṇḍu^oan sangat mirip dengan aksara prasasti tembaga Raṇḍusari I (Poh) 905 M yang berasal dari masa pemerintahan Rakai Balitung. Kemiripan ini terlihat dalam berbagai aspek. Hampir semua ciri aksara prasasti Muṇḍu^oan ada di prasasti ini. Perbedaan mencolok ada pada penggunaan aksara ^oa yang dapat dengan mudah diamati. Misalnya pemahatan kata *soangsoang* prasasti Muṇḍu^oan aksara ^oa selalu dipahatkan berdiri sendiri, sedangkan pada prasasti Poh aksara ^oa digantikan dengan aksara *wa*. Selain itu, pahatan *anuswara* aksara *a* pada ke dua prasasti ini juga di posisi yang sama, yakni tepat ditengah aksara.

Aksara *wa* dipahatkan berbeda dengan yang ada di prasasti Poh misalnya kata *wariga* () pada baris 8 lempeng I dan *sowang sowang* () pada akhir baris yang sama, pemahatannya lebih ‘gemuk’ dibandingkan dengan pemahatan ligatur *wa* pada prasasti Muṇḍu^oan. Aksara *wa* pada prasasti Muṇḍu^oan dipahatkan menyerupai kotak segi empat yang simetris dan memiliki dua jenis tanda *serif* yang kadang-kadang dipahatkan bersamaan, sedangkan pada prasasti Poh aksara ini dipahatkan sama dengan bagian atas aksara agak menyempit ke dalam di kedua sisinya dan tanda *serif*nya dipahatkan melengkung ke arah kanan di bagian kiri atas aksara. Namun demikian, pada umumnya aksara *wa* dipahatkan mirip dengan aksara ‘d’ kapital. Pada prasasti Poh, pasangan *-wa* banyak digunakan, sedangkan pada prasasti Muṇḍu^oan pasangan *-wa* hanya digunakan sekali saja. Ada pun prasasti tembaga Raṇḍusari II yang dikeluarkan oleh Dang Acarya Munindra pada tahun 885 M memiliki bentuk aksara yang tidak jauh berbeda dengan prasasti Poh. Pada prasasti Raṇḍusari II, aksaranya dipahatkan dengan tegak dan berbentuk kaku.

Selain kemiripan yang mencolok antara prasasti Muṇḍu^oan dan prasasti Poh, prasasti lain yang pahatan aksaranya mirip adalah prasasti Kwak I yang berangka tahun 801 Ś (879M). Perbedaan yang dapat diamati dari kedua prasasti ini adalah pemahatan aksara dan tanda *wiramanya*. Pada prasasti Kwak I,

pemahatan aksaranya tegak, tidak miring 15° sebagaimana lazimnya aksara Kawi standar. Pemahatan tanda *wiramanya* cenderung menaungi seluruh aksara mulai dari bagian kiri atas aksara hingga hampir mencapai bagian kiri bawah aksara, misalnya pada kata *pasĕk* (). Hal ini sangat bertolak belakang dengan pemahatan tanda *wirama* pada prasasti Muṇḍu^oan yang menaungi aksara namun hanya sebagian saja dan cenderung memanjang ke arah kiri bawah kaki aksara, misal *pasĕk* (). Pemahatan aksaranya cenderung sama.

Aksara yang dipahatkan pada prasasti Muṇḍu^oan sesuai dengan aksara tipe Kawi awal yang berkembang sejak tahun 750 M hingga tahun 925 M; termasuk di dalam jenis aksara ini adalah aksara Kawi standar yang berkembang pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi—Rakai Balitung (856—910 M). Jadi, prasasti Muṇḍu^oan memang dibuat sesuai dengan angka tahun yang ditulis pada prasasti tersebut. Pahatan aksara prasasti Muṇḍu^oan umumnya stabil dan jarang terjadi kesalahan penulisan. Pahatan aksara prasasti Muṇḍu^oan sangatlah sederhana dan tidak ada hiasan apapun. Semua aksara dipahat rapi dengan jarak 0,2 hingga 0,4 mm. Ukuran aksaranya juga seimbang antara tinggi dan lebarnya, yakni lebar 0,4-0,6 mm dan tinggi 0,5 mm, kalau pun ada kesalahan penulisan, tidak banyak. Kesalahan yang paling mencolok pada penulisan kata *pasĕkpasĕk*. Pada baris dua lempeng dua kata ini ditulis *pasakpasak* tanpa adanya tanda *ulu* untuk vokal *ĕ* (*e pĕpĕt*) di atas aksara *sa*. Sedangkan pada baris enam lempeng kedua, kata ini memiliki tanda *ulu* di atas aksara *sa*. Kesalahan penulisan kata ini murni berasal dari *citrlekha*. Melihat bentuk aksara serta sedikitnya kesalahan penulisan di Prasasti Muṇḍu^oan, dapat dipastikan *citrlekha* prasasti Muṇḍu^oan merupakan *citrlekha* resmi dari penguasa wilayah yang bersangkutan.

IV. 2. Unsur Isi

IV. 2. 1. Bahasa

Tujuan pengujian terhadap bahasa dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kalimat dengan masa ketika prasasti itu dikeluarkan. Pengujian bahasa ini meliputi:

1. kata, untuk melihat apakah kata yang digunakan sesuai dengan masanya
2. kalimat, pada prasasti Jawa Kuno biasanya menggunakan kalimat-kalimat dasar yang jelas
3. wacana, menyangkut bagian yang lebih besar dari kata dan kalimat, dapat meliputi keseluruhan isi prasasti.

IV. 2. 1. 1. Penggunaan kalimat yang tidak lengkap

Bentuk bahasa yang dipakai prasasti Muṇḍu^oan merupakan bentuk kalimat prosa. Bentuk kalimat pada bahasa prosa adalah kalimat pendek dan cenderung disingkat layaknya sebuah telegram. Ketika melakukan penelitian terhadap jenis bahasa seperti ini, maka diperlukan kata-kata tambahan untuk melengkapi kalimat sehingga kalimat yang dipahatkan oleh *citralekha* memiliki arti yang utuh. Misalnya:

1. pada bagian penanggalan prasasti Muṇḍu^oan

//swasti śaka warṣātita 748 māgha māsa nawami
śuklapakṣa. ha. ^ou. wṛ. wāra.....

Kalimat di atas merupakan kalimat yang umum dipakai pada prasasti Jawa Kuno. Kalimat itu tidak sejelas kalimat awal pada prasasti Tulang Air:

//swasti śaka warṣātita 772 āsadhamāsa tithi dwitiya
śuklapakṣa. tu. pa. ā. wāra.....

Jadi, kalimat pada bagian awal prasasti Muṇḍu^oan itu seharusnya:

//swasti śaka warṣātita 748 māgha māsa [tithi] nawami
śuklapakṣa. ha [haryang]. ^ou [umanis]. wṛ [wṛhaspati].
wāra.....

Sehingga dapat diartikan “Selamat! tahun Śaka telah berlalu 728, hari Kamis Legi (hari pasaran ke-5) hari ke-2 minggu yang 6 hari, hari ke-9 pada bagian paruh terang bulan maghā.....”

2. pada baris 5 lempeng I

..mu^oañ saprakāraṇiṅ mañilala saparānya madu^oal mawli...

Kalimat ini seharusnya dilengkapi sehingga berbunyi:

*.....mu^oañ saprakāraṇiṅ mañilala [drwwya haji] saparānya
madu^oal maw=li.....*

Sehingga dapat diartikan “.....lebih-lebih lagi juga [oleh] segala jenis pemungut pajak (*mañilala drwwya haji*). Segala jenis jual beli.....”

3. pada baris 4 lempeng II

.....pituṅtuṅnya 5 pirak mā 5 so^oang so^oang.....

Kalimat ini selengkapnya adalah *pituṅtuṅnya 5 [kapu^oa winaiḥ pasēkpasēk]* *pirak mā 5 so^oang so^oang* sehingga dapat diartikan ‘*pituṅtuṅnya* ada 5 orang masing masing (mendapat hadiah) 5 *māsa* uang perak.’

IV. 2. 1. 2. Penggunaan ejaan yang terpengaruh hukum *sandhi*

1. *u-a* tidak berubah menjadi *-wa*

Aksara ^o*a* banyak diperhatikan secara mandiri. Aksara ^o*a* yang berdiri sendiri ini banyak digunakan sebagai vokal sebagai pengganti dari ligatur *-wa* ketika terjadi hukum *sandhi* antara aksara *u* dan *a* yang letaknya berdampingan dalam satu kata, sehingga pasangan *-wa* tidak banyak terpakai. Pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, penggunaan vokal ^o*a* ini masih terus berlanjut, hanya saja secara perlahan tapi pasti penggunaan vokal ^o*a* mulai digantikan oleh ligatur *-wa*. Pada masa pemerintahan Rakai Balitung, lebih banyak digunakan ligatur *wa* sebagai akibat dari hukum *sandhi* antara vokal *u* dan ^o*a*.

Penggunaan vokal ^o*a* sebagai pengganti ligatur *wa* ini lazim dipergunakan dalam prasasti yang berasal dari masa sebelum pemerintahan Rakai Kayuwangi (Umar, 1970: 6). Namun demikian, pada prasasti Garung (829 M) ada sebuah kata yang mengalami hukum *sandhi* *u* dan ^o*a* yang berubah menjadi *wa*, yaitu pada kata *amatwakan*. Pada prasasti Kayumwungan (824 M) juga ditemukan

penggunaan ligatur *-wa* pada kata *wadwa* serta *anak wanua* atau *anak banwa*, juga pada prasasti Tulang Air (850 M) juga ditemukan kata yang sama, yakni *wadwa*. Selain itu, di prasasti Tulang Air ditemukan juga penggunaan vokal *°a* sebagai pengganti ligatur *wa* pada kata *tiruan*, *karua*, *rua*, dan *wanua*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan penggunaan ligatur *-wa* sebagai pengganti vokal *u* dan *°a* yang melesap karena hukum *sandhi* telah dimulai sejak prasasti Garung. Contoh penggunaan aksara *°a* yang berfungsi sebagai pengganti ligatur *-wa* di prasasti Muṇḍu[°]an ada pada kata *muṇḍu[°]an*, *mu[°]aṅ*, *bu[°]at*, *madu-[°]al*, *wadu[°]a*, *yapu[°]an*, *palinḍu[°]a*, *so[°]aṅ so[°]aṅ*, dan *kapu[°]a*. Namun demikian, pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Balitung memerintah, masih ada prasasti yang menggunakan *°a*; misalnya saja prasasti Wanua Tengah III. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *°a* ini kemungkinan tergantung pada *citralekha*.

2. *a-i* tidak berubah menjadi *é*

Pada prasasti-prasasti yang lebih muda—misalnya prasasti Lintakan 919 M (*KO I*), prasasti Kakurugan 1023 M (*KO V*), prasasti Waharu IV 931 M (*KO VII*)—vokal rangkap *ai* biasanya berubah menjadi *é*. Contoh pada kata *winaih* berubah menjadi *winéh*, *gawai* berubah menjadi *gawé*, *kabaih* menjadi *kabéh*. Namun hal ini tidak terjadi pada prasasti Muṇḍu[°]an. Baik pada kata *kabaih* maupun *winaih* tidak dituliskan *kabéh* atau *winéh*.

Pada prasasti Muṇḍuan, setelah penyebutan angka tahun dan penanggalan disebutkan kata '*tatkāla*'. Hal ini merupakan ciri khas prasasti yang berasal dari abad ke-9 M. Pada prasasti-prasasti abad ke-10 M, setelah disebutkannya penanggalan biasanya dilanjutkan oleh kata *irika diwasa* atau *irika diwasanyājña*; contohnya adalah prasasti Lintakan 919 M (*KO I*). Penggunaan kata *tatkāla* lebih banyak dipakai pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan raja penguasa wilayah. Namun demikian, pada abad ke-9 M prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja pun umumnya masih menggunakan kata *tatkāla* setelah penyebutan unsur penanggalan. Contohnya adalah prasasti Tri Tpusan (Brandes, *OJO X*), dan Ra Mwi (Stuart, *KO XV*).

IV. 2.2. Kronologi

Pada zaman dahulu penetapan *sīma* yang menyangkut status tanah harus mencantumkan unsur penanggalan. Unsur penanggalan biasanya ditulis dengan lengkap dan tepat yang dilanjutkan dengan nama penguasa dan pejabat-pejabat yang bersangkutan sehingga kerangka kronologinya menjadi jelas. Berdasarkan keterangan yang telah disebut sebelumnya dapat diketahui masa pemerintahan seorang raja (Boechari, 1977b: 5). Penggunaan unsur penanggalan prasasti Jawa Kuno menurut de Casparis dibagi atas 4 kelompok berdasarkan periode waktunya. Perhatikan tabel. 2 di bawah ini:

Tabel 4.1. Perkembangan Unsur Penanggalan Jawa Kuno

No.	Unsur penanggalan	Asal Prasasti			
		< tahun 900 M	tahun 900– 1000M	tahun 1000-1250 M	> tahun 1250 M
1.	Tahun	√	√	√	√
2.	Bulan	√	√	√	√
3.	Pakṣa	√	√	√	√
4.	Tithi	√	√	√	√
5.	Hari pasaran	√	√	√	√
6.	Planet		√	√	√
7.	Nakṣatra		√	√	√
8.	Dewatā		√	√	√
9.	Yoga		√	√	√
10.	Wuku		√	√	√
11.	Karaṇa			√	√
12.	Maṇḍala			√	√
13.	Parweśa			√	√
14.	Rāśi			√	√
15.	Muhūrta				√

(Sumber: de Casparis, 1978: 56).

Prasasti Muṇḍu^oan memiliki lima unsur penanggalan yang dipahat dengan cukup jelas meski agak aus. Hasil pembacaan menunjukkan angka tahun 728 Ś atau 807 M. Pembacaan angka tahun ini sesuai dengan apa yang ada dalam daftar Nakada (1982), Darmosoetopo (2003), dan Boechari (Poesponegoro, ed. 1993:

115). Unsur penanggalan dalam prasasti dapat disebut sebagai penanggalan absolut yang dapat menunjang perkiraan kronologi suatu prasasti disamping ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh prasasti bersangkutan. Pada prasasti Muṇḍu^oan ada 5 unsur yakni angka tahun 728 Ś (*warsa*), bulan (*maghā*), *pakṣa*⁷⁴ (*śuklapakṣa*), *tithi* (*nawami*), hari pasaran yang terdiri atas 3 unsur yakni *ha* (*haryang*), *u* (*umanis*), *wṛ* (*wṛhaspati*). Menurut Boechari (Poesponegoro, ed. 1993: 115) penanggalan pada prasasti Muṇḍu^oan jatuh pada tanggal 21 Januari 807 M. Sedangkan hari dikeluarkannya prasasti adalah hari Kamis Legi pada sistem *saptawāra* dan *pañcawāra* dan hari ke-6 (*haryang*) pada sistem *sadwāra*. Sehingga dapat dipastikan menurut unsur penanggalan, prasasti ini merupakan prasasti yang berasal dari awal abad ke-9 M.

IV. 2.3. Geografi

Satuan wilayah terkecil adalah *anaking wanua*, dalam satuan wilayah modern dapat disamakan dengan dukuh. Satuan wilayah yang lebih besar dari *anaking wanua* adalah *wanua* (desa), dan diikuti satuan wilayah lebih besar adalah *watak / watĕk*. Menurut van Naerssen (1977: 37) penguasa wilayah tertinggi pada masa Jawa Kuno adalah *rakai*. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang telah ada sebelum pengaruh Hindu datang ke Indonesia yang kemungkinan dibentuk karena adanya pengaruh ekologis (Naerssen, 1977: 40).

Edi Sedyawati (1985)⁷⁵ yang mengutip pendapat van Naerssen mengemukakan bahwa kepentingan pengolahan tanah merupakan pendorong utama dalam penataan wilayah. Pernyataan bahwa dewan tetua dipimpin oleh seorang *rāma* harus disanggah karena data prasasti justru menunjukkan beberapa *rāma* dalam satu *wanua* tanpa ada satu yang dinyatakan dengan tegas sebagai

⁷⁴ Pada sistem penanggalan Jawa Kuno, dalam satu bulan terdapat 30 hari yang di bagi dalam dua bagian yang sama. 15 hari pertama pada bulan berjalan disebut *suklapakṣa* (paro terang) dan 15 hari sisanya disebut *kṛṣṇapakṣa* (paro gelap). Namun, karena perhitungan awal tahun, yang dimulai pada bulan *Caitra* jatuh pada pertengahan Maret hingga awal April, maka dapat dipastikan bahwa *tithi pratipada śuklapakṣa* (hari ke-1 paruh terang) selalu jatuh pada hari ke-1 bulan berjalan.

⁷⁵ Sedyawati, Edi. 1985. *Pengarcaan Ganeśa Masa Kaḍiri dan Siṅhasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian*. Jakarta: FSUI.

pucuk pimpinan *wanua*. *Tuha* kiranya tidak sebanding dengan *rāma*. *Rāma* adalah anggota dewan pimpinan *wanua*, sedangkan *tuha* bersinonim dengan *juru*, yang merupakan pimpinan dari orang-orang seprofesi. Keadaan lingkungan terutama yang berhubungan dengan pertanian membuat *wanua-wanua* itu bekerja sama, terutama untuk pengairan sawah. Kerjasama itu memerlukan pimpinan tingkat *wanua*, yakni *raka* (van Naerssen, 1977: 39-41; Sedyawati, 1985: 298). Istilah *raka* sebagai pimpinan tingkat *wanua* yang dinyatakan oleh van Naerssen ini perlu mendapat catatan, karena sebenarnya dalam prasasti-prasasti istilah *raka* tidak pernah ditemukan. Penyebutan istilah yang umum dipakai dalam prasasti bukanlah *raka* melainkan *rakai* atau *rake* dan *rakarayān* (Sedyawati, 1985: 299).

Setelah pengaruh Hindu datang ke Indonesia, adaptasi terhadap sistem pemerintahan India mulai terlihat. Menurut Tedjowasono (1981: 44-45), berdasarkan data epigrafi dapat ditarik kesimpulan bahwa kerajaan di zaman kuno tidak ada yang berbentuk sebuah negara dengan satu kekuasaan tunggal yang mutlak. Begitu pula dengan Kerajaan Mataram Kuno. Biasanya ada tiga kesatuan teritorial di suatu wilayah kerajaan, yakni *rajya*, *watak* dan *wanua*. *Watak* adalah daerah otonom yang diperintah oleh penguasa setempat yang bergelar *rakai* atau *rakryān* atau *samgat* atau *haji* yang diikuti oleh nama daerah asal mereka (Boechari, 1976). Pada umumnya, penguasa *watak* itu mempunyai hubungan dekat dengan raja atau jika bukan keluarga raja, maka jabatan sebagai penguasa wilayah itu diwarisi secara turun temurun. Pada dasarnya gelar *rakai* atau *samgat* tidak hanya dapat diperoleh secara turun temurun, namun gelar ini juga dapat diperoleh karena seseorang memiliki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan.

Watak menurut van Naerssen (1977: 37) merupakan cakupan wewenang dari masyarakat tempat asal seorang *raka*.

“An authority of the higher order during Java’s earliest history was doubtlessly *raka*. According to the oldest available Hindu-Javanese historical sources he may be considered as the sovereign with regard to his de facto power, that is, his power to dispose of material and labor. The title of *raka* primarily indicated the ruler of a number of *wanuas*; these communities where under the

jurisdiction (*watak*) of the community of which the *raka* originated.”

de Casparis (1981: 140-147) menyatakan bahwa *watak* menunjukkan suatu kelompok desa yang bergantung pada seorang pejabat tinggi yang menyandang gelar *rakai* atau *samgat*. Kelompok desa yang tercakup dalam satu *watak* ini tidak harus terletak berdekatan sehingga dapat membentuk suatu wilayah tersendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam sebuah *watak*, letak *wanua-wanuanya* tidak harus terletak dalam satu wilayah administratif yang sama seperti desa-desa yang terletak dalam satu kecamatan pada masa kini.

Dalam kalimat Jawa Kuno, suatu partikel penunjuk dipakai khusus untuk menunjukkan suatu *wanua*. Partikel-partikel itu adalah *i*, *ij* atau *ri* yang diletakkan di depan nama *wanua*. Sedangkan nama *watak* dapat dikenali dengan mudah karena selalu di dahului kata ‘*watak*’ yang diikuti nama *wataknya*. Misalnya: *watak Patapān*, *watak Hameas*.

IV. 2. 3. 1. Patapān

Arti nama *patapān* (kata dasar *tapa* yang berarti pengendalian indera atau nafsu, yoga; yang ditambah awalan *pa-* dan akhiran *-an* adalah tempat kediaman pertapa atau pertapaan. Menurut Santiko (2005: 135), arti kata *tapa* adalah ‘panas’ atau ‘semangat yang menyala’ dan untuk menyebut semua tindakan manusia yang bersifat pengabdian yang diikuti oleh pengendalian diri yang dilakukan dengan semangat dan kemauan yang sangat teguh sehingga menimbulkan panas badan si pelaku. *Patapān* merupakan tempat seseorang mengasingkan diri untuk bertapa dalam jangka waktu tertentu hingga memperoleh tujuan yang dimaksud (Soepomo, 1977, II: 66-67⁷⁶; Santiko, 2005: 133). *Patapān* merupakan salah satu tempat suci bagi para *ṛṣi*. Kata *Patapān* tidak hanya digunakan untuk menyebut *maṇḍala*⁷⁷, tetapi tempat-tempat suci para *ṛṣi*

⁷⁶ Soepomo, S. 1977. *Arjunawijaya of Mpu Tantular*, Vol II. The Hague: Martinus Nijhoff.

⁷⁷ *Maṇḍala* adalah sebuah *wanāsrama*, tempat sakral para *ṛṣi*. Menurut naskah *Rājapatiguṇḍala* sebuah naskah undang undang yang dikarang oleh raja Bhatati/Kṛtanāgara dan disusun ulang pada masa Majapahit—*maṇḍala* dipimpin oleh seorang *siddapandita* yang disebut *dewaguru* (Pigeaud, 1960 I: 87-89)., karena itu *maṇḍala* juga dikenal sebagai *kadewaguruan*. Baik *maṇḍala* maupun *patapān* merupakan tempat mengasingkan diri untuk bertapa. Bedanya, *maṇḍala* adalah sebuah

lainnya seperti *katyagan*, *janggan* dan sebagainya juga disebut *patapān*, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *patapān*, seperti halnya *wanāśrama*⁷⁸ adalah nama umum bagi tempat suci *karesyan* (Santiko, 2005: 133).

Nama Patapān kecuali nama desa (*wanua*), juga merupakan nama *watak* yang meliputi desa Patapān (prasasti Sangsang 907 M, prasasti Kaṇḍangan 906 M) dan desa Mantyāsih (prasasti Mantyāsih, 907 M). Sedangkan penyebutan *watak* Patapān yang dikuasai oleh seorang *rakai* ada di prasasti Muṇḍu^oan⁸⁰⁷ M, prasasti Kayumwungan 824 M, prasasti Gondosuli II 832 M, dan prasasti Tulang Air 850 M, 772 Ś serta prasasti Ra Kidan [750-800] (Damais, 1970: 438; Darmosoetopo, 2003: 211).

Berdasarkan uraian sebelumnya, *watak* Patapān adalah sebuah daerah otonom khusus bagi para petapa. Pada awalnya, wilayah ini hanya terdiri atas beberapa rumah bagi petapa, namun kemudian berkembang menjadi sebuah kompleks pertapaan yang besar (*wanāśrama/patapān*) hingga meliputi wilayah yang luas. Atau dapat juga dikatakan bahwa penduduk dari *watak* ini kebanyakan adalah para cerdik cendekia yang mendalami agama dan mengasingkan diri sehingga disebut *patapān*.

IV. 2. 3. 2. Muṇḍu^oan

Nama Muṇḍu merupakan nama pohon, seperti yang disebutkan dalam prasasti Gondosuli II:

..... *muṇḍu dua lattir kakalyan sa lattir....*

Sedangkan nama Muṇḍu^oan sebagai sebuah wilayah *wanua* dengan variasi penulisan Muṇḍwan, Muṇḍuān, Muṇḍuan ada di prasasti Tri Tepusan dan prasasti Mantyāsih. Berikut penggalan kalimat yang menyebut nama-nama ini:

kompleks perumahan pertapa dan bersifat permanen. *Maṇḍala* atau *kadewaguruan* ini letaknya jauh terpencil di tengah hutan, di lereng-lereng gunung, di puncak bukit, dan di tepi laut (Santiko, 2005: 112-113).

⁷⁸ Dalam agama hindu, ada 4 tingkatan hidup bagi penganutnya yang disebut *caturasrama* (*caturāśrami* dalam prasasti-prasasti di Jawa), yaitu: *brahmacari* (hidup sebagai murid, mencari bekal spiritual), *grhaṣṭha* (membangun rumah tangga untuk mendapatkan keturunan), *wanapraṣṭha* (setelah menjalankan tingkat kedua, selanjutnya pergi mengundurkan diri ke hutan untuk mencari jalan kalepasan), dan *sanyasin/bhikṣuka*. Golongan *rṣi* ini tidak lain adalah *wanapraṣṭha* dan mungkin pula ditambah *sanyasin* yang berkumpul dalam suatu kompleks tertentu yang disebut *wanāśrama/patapān* (Santiko, 2005: 129-133).

*rāma tpi siriṅ milu sāksī ...juru si pyaṅ rama ni muṅḍu
anak wanua iṅ sukup sīma kudur....(Poh 905 M)*

*sāksī....rama i muṅḍwan si kucira winaih....rama i
kalaṅḍingan si rawak winaih.... (Tri Tepusan II 842 M)*

*//rāma i tpi siriṅ iṅkaṅ kāla i muṅḍuān gusti si guwi rama
ni krami i haji huma gusti si hiwā.....(Mantyāsih I 907 M)*

*//rāma i tpi siriṅ rikaṅ kāla i muṅḍuan gusti si guwi rama
ni krami i haji huma gusti si hiwā.... (Mantyāsih III [907
M])*

*kumonakan nikananṅ wanua i mantyāsih muaṅ alas nya i
muṅḍuan i kayu paṅjanṅ muaṅ....(Mantyāsih I 907 M)*

*kumonnakan nikananṅ wanua i mantyāsih muaṅ alas nya i
muṅḍuan i kayu paṅjanṅ muaṅ pomahan i kuniṅ.....
(Mantyasih II 9[07] M) (Damais, 1970: 861).*

Muṅḍu^oan merupakan nama sebuah *wanua* dalam prasasti Tri Tepusan dan prasasti Mantyāsih I, II, dan III. Muṅḍu^oan merupakan *wanua i tpi siriṅ* dari *wanua* Mantyāsih. Hal ini diketahui dari penyebutan jabatan *rāma i* yang merupakan sebutan bagi jabatan kelompok kepala desa masa Jawa Kuno. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Mantyāsih I dan II, kemungkinan Muṅḍu^oan ini merupakan sebuah *wanua* yang memiliki hutan (*alas*). Penyebutan nama Muṅḍu^oan di prasasti Mantyāsih menunjukkan bahwa Muṅḍu^oan merupakan sebuah desa yang telah ada sejak tahun 807 M.

IV. 2. 3. 3. Haji Huma

Sedangkan nama Haji Huma dapat dijumpai dalam prasasti Mantyāsih dan prasasti Kasugihan. Berikut penggalan kalimatnya:

*//rāma i tpi siriṅ iṅkaṅ kāla....i haji huma gusti si hiwā i
tulang air gusti si palarasān rama ni bāhu.....(Mantyāsih I
907 M)*

*//rāma i tpi siriṅ iṅkaṅ kāla....i haji huma gusti si hiwā i
tulang air gusti si palarasān rama ni bahu.....(Mantyāsih
III 907 M)*

Juru niḡ maṅḍakat saḡ juna anak wanua i kuraḡ pkan watak śirikan maṅraṅkpi saḡ khadga anak wanua i haji huma watak patapān..... (Kasugihan 907 M) (Damais, 1970: 131).

Sama seperti Muṅḍu^oan, Haji Huma juga merupakan sebuah *wanua* yang mungkin merupakan *wanua i tpi siring* dari Mantyāsih. Haji Huma hanya disebutkan dalam tiga prasasti yang berangka tahun sama yakni prasasti Mantyāsih I, prasasti Mantyāsih III dan prasasti Kasugihan. Tidak seperti *wanua* Muṅḍu^oan yang disebutkan dalam prasasti sebelum tahun 850 M, Haji Huma merupakan sebuah *wanua* yang ada di sekitar Mantyāsih, Kayumwungan, Muṅḍu^oan dan Paṅḍakyan; selain itu nama Haji Huma baru disebutkan di prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Rakai Balitung.

IV. 2. 3. 4. Kayumwungan

Nama wilayah yang ada di sekitar wilayah Muṅḍu^oan dan Haji Huma dapat diketahui dari pejabat-pejabat yang hadir sebagai saksi dalam upacara penetapan *sīma*. Nama-nama wilayah yang disebut dalam prasasti Muṅḍu^oan adalah Kayumwungan, Mantyāsih, dan Paṅḍakyan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Kayumwungan termasuk salah satu wilayah *watak Patapān*. Hal ini diketahui dari penyebutan nama penguasa *watak Patapān* pada prasasti Kayumwungan. Kayumwungan merupakan nama sebuah *wanua*; hal ini disebutkan dalam beberapa prasasti, yaitu:

iḡ babadan... winih nya ha 2 i kisir lmah ri kayumwungan (Kayumwungan 824 M)

rama i kayumwungan si tamwah winaiḡ wḍihan....juru i mantyāsih si kali winaiḡ wḍihan....(Tri Tepusan II 842 M)

patih wanua kayumwungan si dhantan mantyāsih si jakkhāra parwuwus nya pu nta pramaṇa....(Tulang Air I 850 M)

patih wanua kayumwungan si jāntan mantyāsih si jakkhāra parwuwus nya pu nta pramaṇa....(Tulang Air II 850 M)

*//patih kayumwungan irikaṅ kāla rake oṅḍo rama ni kapur
sukun saṅ gambhira rama ni duḍu.....(Mantyāsih I 907 M)*

*//parujar ni patih kayumwungan si harus rama ni kudu
sukun si watu rama ni wiryyan.... (Mantyāsih II 907 M)
(Damais, 1970: 323).*

Berdasarkan keterangan dalam 6 prasasti yang telah disebutkan, Kayumwungan merupakan nama sebuah *wanua*. Baik jabatan *rāma* maupun *patih* merupakan jenis jabatan yang biasanya ada pada sistem birokrasi *wanua* dan *watak* pada masa Jawa Kuno.

IV. 2. 3. 5. Mantyāsih

Keterangan mengenai Mantyāsih yang merupakan sebuah *wanua* dapat dijumpai pada prasasti Kayu Ara Hiwang 901 M, prasasti Poh 905 M, prasasti Mantyāsih I dan II 907 M, juga disebut dalam prasasti abad 9, yaitu prasasti Kayumwungan, prasasti Tri Tepusan, dan prasasti Tulang Air. Keterangan mengenai Mantyāsih dapat di temukan di:

*nāyaka ḍi mantyasih ḍa pu nta marhyaṅ jhānatatwa nāmā
ṅḍa (Gondosuli II 832 M)*

*sāksījuru i mantyāsih si kali winaih....rama i tri haji si
mana winaih(Tri Tepusan II 842 M)*

*patih wanua kayumwungan si dhantan mantyāsih si jakkhāra
parwuwus nya pu nta pramāṅa si gaṅḍah pu nta sḍaṅ si
murana....(Tulang Air I 850 M)*

*patih wanua kayumwungan si jāntan mantyāsih si jakkhāra
parwuwus nya pu nta pramāṅa si gaṅḍah pu nta sḍaṅ si
murana...(Tulang Air II 850 M)*

*tuhān i makudur saṅ makudur waṅun sugih pu maṅikṣa anak
banua mantyāsih watak makudur....(Kayu Ara Hiwang 901
M)*

*saṅ tuhān ni makudur 2 saṅ asam paṅjaṅ si dharmma muay
saṅ taṅkil sugih si manikṣa anak wanua i mantyāsih watak
makudur(Panggumulan, 902 M)*

*saṅ juru ni makudur 2 saṅ taṅkil sugih pu mankai anak
wanua i mantyāsih watak makudur(Poh 905 M)*

kumonakan nikanan wanua i mantyāsihmuañ alas nya i muñduan i kayu pañjan(Mantyāsih I 907 M 1b: 2-3)

ikanan patih mantyāsih atah pramāṇā iriya // (Mantyasih I 907 M 1b: 9)

ianugrāhahākan rikanan patih mantyāsih sīma kapatihana(Mantyasih I 907 M 2a: 21-22)

kumonnakan nikanan wanua i mantyāsih winih(Mantyasih II 9[07] M a: 9-10)

nāhan cihna nya n mapagéh ikanan wanua i mantyāsih muañ(Mantyasih I 907 M 2a: 21)

pisora niñ anugraha rika kāla patih mantyāsih sañ krēsna rama ni ananta muañ soara niñ rāma i mantyāsih kabaih(Mantyasih III [907 M] z b: 5-6)

nāhan cihnanya n sampun mapagéh ikanan wanua i mantyāsih muañ.....(Mantyasih III [907 M]z b: 10) (Damais, 1970: 863-864).

Pada prasasti Mantyāsih, beberapa kali disebutkan kata Mantyāsih didahului oleh jabatan *patih* yang merupakan jenis jabatan tingkat *watak*, tetapi lebih banyak yang menyebutkan Mantyāsih sebagai sebuah *wanua*. Penyebutan nama Mantyāsih yang didahului oleh kata *patih* dapat diartikan ‘sebagai *patih* yang berkedudukan di.....’ atau dapat pula diartikan ‘*patih* dari wilayah Mantyāsih’. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa *wanua* Mantyasih ada di *watak* Patapān, pada prasasti Kayu Ara Hiwang dan prasasti Panggumulan, *wanua* Mantyāsih terletak di *watak* Makudur. Adanya dua nama *wanua* yang sama tetapi terletak di wilayah *watak* yang berbeda ini tidaklah aneh karena sangat dimungkinkan bahwa sebuah desa beralih dari cakupan wewenang suatu *watak* ke *watak* yang lain berdasarkan suatu alasan tertentu. Penyebutan nama Mantyāsih pada prasasti abad ke-9 M menunjukkan bahwa Kayumwungan dan Mantyāsih merupakan sebuah *wanua* yang kemungkinan sudah ada sejak masa awal Kerajaan Mataram Kuno.

IV. 2. 3. 6. Paṅḍakyan

Keterangan mengenai Paṅḍakyan dapat dijumpai pada:

i Paṅḍakyan juru si rindaṅ rama ni gunuṅ (Kayumwungan 824 M a: 38-39)

sākṣī.....? juru i Paṅḍakyan si mnaṅ winaih wḍihan yu I rama i muṅḍwan si kucira winaih wḍihan yu I..... (Tri Tepusan 842 M a: 22-23)

i Paṅḍakyan si mandon rama ni sonde samwal si piṅul rama ni madhawa kapua winaih... (Mantyāsih I 907 M 1b: 20)

juru i Paṅḍakyan si mandon rama ni sonde samwal si piṅul rama ni madhawa kapua winaih... (Mantyāsih III 907 M z a: 10) (Damais, 1970: 350).

Berdasarkan uraian sebelumnya, wilayah Paṅḍakyan pun tidak berbeda dengan wilayah Kayumwungan maupun Mantyāsih. Penyebutan *wanua* Paṅḍakyan pada pertengahan abad ke-9 M menunjukkan bahwa *wanua* ini merupakan jenis *wanua* yang telah berdiri sejak lama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama-nama *wanua* yang ada di prasasti Muṅḍu^oan adalah Muṅḍu^oan, Haji Huma, Kayumwungan, Mantyāsih dan Paṅḍakyan. Kecuali Haji Huma, nama *wanua* lainnya Muṅḍu^oan, Haji Huma, Kayumwungan, Mantyāsih dan Paṅḍakyan) sering disebut dalam prasasti-prasasti yang berasal dari pertengahan bahkan awal abad 9 seperti prasasti Kayumwungan, prasasti Gondosuli II, prasasti Tri Tepusan, dan prasasti Tulang Air. Selanjutnya, nama-nama *wanua* ini juga muncul pada prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Rakai Balitung, yaitu prasasti Poh, prasasti Mantyāsih dan prasasti Kaṅḍangan. Secara ringkas, penyebutan nama-nama *wanua* ini dalam berbagai prasasti dapat dilihat pada tabel 4. 2. di bawah ini:

Tabel 4. 2. Penyebutan nama-nama *wanua* dalam prasasti Muṅḍu°an di dalam prasasti lain

	Nama Prasasti	Nama <i>wanua</i>				
		Muṅḍu°an	Haji Huma	Kayumwungan	Mantya°asih	Paṅḍakyan
1	Muṅḍu°an (807 M)	√	√	√	√	√
2	Kayumwungan (824 M)			√		√
3	Gondosuli II (832 M)				√	
4	Tri Tepusan I (842 M)					√
5	Tri Tepusan II (842 M)	√		√	√	
6	Tulang Air I (850 M)			√	√	
7	Tulang Air II (850 M)			√	√	
8	Kayu Ara Hiwang (901 M)				√	
9	Panggumulan (902 M)				√	
10	Poh (905 M)				√	
11	Mantyasih I (907 M)	√	√	√	√	√
12	Mantyasih II (907 M)	√	√	√	√	
13	Mantyasih III (907)	√			√	√
14	Kasugihan (907 M)		√			

IV. 2. 4. Tokoh

Tokoh yang memerintahkan peresmian *sīma* di wilayah Muṇḍu°an dan Haji Huma adalah Rakai Patapān Pu Manuku. Nama Rakai Patapān Pu Manuku ditemukan pada prasasti Muṇḍu°an (807 M) dan prasasti Tulang Air (850 M) yang berasal dari masa pemerintahan Rakai Pikatan (847 – 855 M). Sedangkan nama Rakai Patapān atau Rakai Partapān sebagai penguasa wilayah ada di prasasti Muṇḍu°an (807 M), prasasti Kayumwungan 824 M, prasasti Gondosuli II dan prasasti Tulang Air 850 M.

Menurut Boechari, *rakarayān* adalah kata jadian yang berasal dari kata dasar “raya” yang berarti besar. Kata dasar ini mendapatkan awalan *ka-* yang ditambahkan akhiran *-an* pada akhir kata jadian. Selain itu juga kata jadian ini mendapatkan awalan penghormatan (*honoris prefiks*) *ra-* [*ra + ka + raya + an*] (Boechari, 1957: 6-7). *Rakarayān* kemudian disingkat menjadi *rakryān* yang kemudian menjadi *rakai* (merupakan singkatan dari *rakryān i*) (Boechari, 1976: 4).

Gelar *rakai* untuk pertama kalinya dijumpai dalam prasasti Kayumwungan yang dijabat oleh Pu Palar. Kedudukan *rakai* termasuk dalam golongan elit karena gelar *rakai* ditentukan berdasarkan hubungan darah seseorang dengan pemerintahan, atau pun posisi seseorang dalam hierarki birokratis (Kartakusuma, 1985: 572). Menurut Boechari (1967-1968: 10—17)⁷⁹ gelar *rakai* diperoleh sebagai gelar kehormatan karena jasa seseorang atau karena perkawinan politik. Sedangkan menurut Darmosoetopo (2003: 33) gelar *rakai* ini muncul ketika seorang pejabat menguasai suatu wilayah *lungguh* tertentu. Namun pendapat-pendapat yang telah diuraikan sebelumnya perlu disanggah, karena gelar *rakai* dapat juga diperoleh berdasarkan garis keturunan tertentu atau warisan⁸⁰ (Poesponegoro, ed. 1993: 240). Dalam kaitannya dengan pendapat

⁷⁹ Boechari. 1967-1968. ‘Rakryān Mahāmantri I Hino: A Study on the Highest Court Dignitary of Ancient Java up to the 13th Century A. D.’ *Journal of the Historical Society University of Singapore*.

⁸⁰ Selain gelar *rakai*, gelar lain yang juga dapat diperoleh berdasarkan ketentuan tertentu adalah *pangkat*, *haji* atau *sāmya haji*. Mereka yang memperoleh gelar ini berdasarkan garis keturunan bukanlah pejabat tinggi kerajaan namun memiliki *puri* tersendiri. Di dalam *puri* itu mereka hidup sebagai raja kecil dan memiliki dayang, seniman (penari, pesinden, penabuh gamelan), *citralekha*, pasukan pengawal, dan lain lain. Seorang raja berhak untuk mencabut ketentuan ini kepada ahli

Darmosoetopo itu, daerah *lungguh* merupakan imbalan jasa bagi seorang *rakai*, karena seorang *rakai* sesungguhnya tidak mendapat gaji dari kerajaan. Sebagai gantinya, para *rakai* ini mendapatkan hak otonomi penuh sebagai penguasa daerah (Poesponegoro, ed. 1993: 199; 206).

Prasasti Munḍu^oan tidak menyebutkan nama raja yang sedang memerintah pada saat prasasti ini dikeluarkan. Dari gelar yang dipakai oleh Pu Manuku dapat diketahui ia adalah seorang penguasa *watak* Patapān. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang terdiri atas beberapa lapisan wilayah yang terdiri dari pusat kerajaan dimana tinggal di dalamnya raja, putra-putri raja, kerabat dekat serta abdi dalam; daerah *watak* yang merupakan daerah kekuasaan para *rakai* dan *samgat*, serta *wanua* yang diperintah oleh para pejabat tingkat *wanua*.

Masing masing tokoh yang disebutkan dalam setiap prasasti Jawa Kuno selalu diikuti oleh kata sandang di depan nama aslinya. Dalam hal ini kata sandang merupakan gambaran derajat pemilik nama dalam struktur sosial masyarakat Jawa Kuno. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Kuno menganut sistem kasta yang diadaptasi dari kebudayaan India, sehingga kedudukan seseorang dalam sistem sosial kemasyarakatan ditentukan oleh kelahirannya. Misalnya gelar *dapunta* atau *dapu* merupakan kata sandang khusus untuk kasta *brahmana*, *pu* atau *dyah* merupakan kata sandang untuk kasta *ksatrya*, kata sandang *sang* untuk kasta *waisya* dan kata sandang *si* untuk kasta *sudra* atau penduduk biasa (Tedjowasono, 1981: 101).

Pu merupakan kata sandang yang biasanya digunakan bersama nama asli pejabat yang bersangkutan. Pada masa pemerintahan Pu Siṅḍok, penggunaan kata sandang *pu* biasanya untuk orang yang kedudukannya lebih rendah setelah Hino, Halu, Wka dan Sirikan yang biasanya menggunakan kata sandang *dyah* di depan nama pejabat. Namun hal ini tidak selalu pasti karena dari prasasti masa Siṅḍok ditemukan seorang pejabat memakai kata *pu* namun di prasasti yang lain ia menggunakan kata *dyah*; contohnya adalah Dyah Sahaśra dalam prasasti Alas Antan dan Pu Sahasra dalam prasasti Hering. Sedangkan nama raja, jarang

waris, misalnya jika mereka memberontak kepada raja yang berkuasa saat itu (Poesponegoro, ed. 1993: 240).

dimulai dengan kata ganti orang *si* atau *sang*, melainkan *pu*, *dyah* dan *Śri*. Misalnya Dyah Tulodong, Dyah Wawa, Pu Lokapala, Pu Daksa, dan Pu Siṅdok (Jones, 1984: 92). Kata sandang *si* atau *sang* biasanya dipakai oleh orang kebanyakan (penduduk biasa).

IV. 2. 4. 1. Rakai Patapān Pu Manuku

Orang yang mengeluarkan perintah peresmian *sīma* Muṅḍuan dan Haji Huma adalah Rakai Patapan Pu Manuku. Dilihat dari gelar yang dipakainya, dapat dipastikan bahwa ia adalah seorang penguasa *watak* yang berkuasa di *watak* Patapān. Muṅḍuan dan Haji Huma merupakan dua *wanua* yang berada dibawah cakupan wewenangnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap prasasti *sīma* abad ke-9 M, ternyata pemberian anugerah *sīma* lebih banyak dilakukan oleh penguasa *watak* dibandingkan oleh raja. Baru pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi pemberian anugerah *sīma* mulai dikeluarkan oleh raja. Namun hanya sedikit, karena umumnya pemberian anugerah *sīma* ini masih tetap diberikan oleh penguasa *watak* atau pejabat tinggi kerajaan tapi menyebutkan nama raja yang memerintah pada saat itu. Misalnya prasasti Tulang Air (850 M). Pada masa pemerintahan Rakai Balitung, pemberian anugerah *sīma* mulai menjadi wewenang raja. Baru pada masa pemerintahan Pu Siṅdok pemberian anugerah *sīma* selalu dilakukan atas wewenang raja seutuhnya. Prasasti *sīma* yang benar-benar murni dikeluarkan oleh raja misalnya prasasti Tunahan (873 M) dan prasasti Ra Mwi (882 M). Prasasti bukan *sīma* tidaklah banyak, contohnya adalah prasasti Salingsingan 880M⁸¹ dan prasasti Raṅḍusari II 885 M⁸². Berikut tabel klasifikasi prasasti abad ke-9 M. Klasifikasi dibuat berdasarkan nama penguasa yang memerintahkan dikeluarkannya prasasti.

⁸¹ Prasasti Salingsingan berisi mengenai pembuatan barang-barang dari emas, perak, dll yang dibuat berdasarkan perintah Śrī Mahārāja Rakai Kayuwangi (*mamuat gawai*). Di antara barang-barang yang dibuat itu misalnya payung perak (Stuart, KO X: 20).

⁸² Prasasti Raṅḍusari II berangka tahun 807 Ś (885 M). Prasasti ini, oleh Stutterheim disebut juga prasasti Ḍaṅg Ācārya Munīndra. Prasasti ini mengenai pembelian tanah oleh Ḍaṅg Ācārya Munīndra untuk kepentingan '*sīma padewāharān*' (Stutterheim, "Oorkonde van Ḍaṅg Ācārya Munīndra Uit 885 A. D." *Incripties van Nederlandsch Indië* 1940: 29-32)

Tabel 4.3. Klasifikasi prasasti *sīma* berdasarkan nama penguasa yang memerintahkan pengeluaran prasasti pada abad 9 M

No.	Nama Prasasti	Tahun	Tokoh yang memerintahkan penganugerahan <i>sīma</i>		
			Penguasa <i>watak</i>	Penguasa <i>watak</i> (menyebut raja)	Raja
1.	Munḍu°an	807M	√		
2.	Kamalagi	821 M	√		
3.	Garung	829 M	√		
4.	Kayumwungan	824 M		√	
5.	Gondosuli II	832 M	√		
6.	Tri Tepusan I	842 M			√
7.	Tri Tepusan II	842 M			√
8.	Layuwatang	846 M	√		
9.	Tulang Air I	850 M		√	
10.	Tulang Air II	850 M		√	
11.	Wayuku	854 M	√		
12.	Talaga Tañjung	862 M	√		
13.	Wukiran	863 M	√		
14.	Wanua Tengah I	863 M		√	
16.	Wanua Tengah II	863M		√	
17.	Kurambitan I	869 M	√		
18.	Tunahan	873 M			√
19.	Waharu I	873 M	√		
20.	Śri Manggala II	874 M	√		
21.	Wihara	874 M	√		
22.	Anggēhan	875 M	√		
23.	Humandīng	875 M		√	
24.	Jurungan	876 M	√		
25.	Haliwangbang	877 M		√	
26.	Kapuhunan	878 M	√		
27.	Mulak	878 M	√		
28.	Mamali	878 M	√		
29.	Kwak II	879 M	√		

30.	Salimar I	880 M	√		
31.	Salimar II	880 M	√		
32.	Salimar III	880 M	√		
33.	Salimar IV	880 M	√		
34.	Salimar VI	880 M	√		
35.	Taragal	881 M		√	
36.	“Pendem I”	881 M		√	
37.	Ratawun I	881 M	√		
38.	Ratawun II	881 M	√		
39.	Ra Mwi	882 M			√
40.	Munggu Antan	887 M		√	
41.	Poḥ Dulur	890M		√	
42.	Balingawan	891 M	√		
43.	Panunggalan	896 M		√	

(Sumber: Damais, 1990: 90-107)

Patapān adalah nama sebuah *wanua*. Selain itu, Patapān juga merupakan nama *watak* yang sangat tua. Dari bukti prasasti, nama *watak* ini sudah disebut dalam beberapa prasasti dari awal abad ke-9 M yaitu dalam prasasti Kayumwungan, prasasti Gondosuli II, dan prasasti Tulang Air. Dalam prasasti-prasasti itu, nama Patapān merupakan sebutan bagi *watak* karena disebutkan penguasa wilayah itu bergelar ‘Rakai Patapān’ atau disebutkan nama ‘*watak patapān*’ seperti dalam prasasti Kaṇḍangan dan prasasti Mantyaṣih.

Pada prasasti Tulang Air, nama penguasa *watak* Patapān yang sama seperti di prasasti Muṇḍu^oan muncul kembali. Jarak yang terbentang antara prasasti Muṇḍu^oan dan prasasti Tulang Air adalah 43 tahun. Dengan jarak yang begitu jauh, tentunya dapat disimpulkan bahwa nama yang sama dari penguasa *watak* Patapān ini menunjukkan bahwa penguasa *watak* ini merupakan jenis penguasa yang secara turun temurun menguasai wilayah ini. Mungkin saja Rakai Patapān Pu Manuku dari prasasti Muṇḍu^oan dan prasasti Tulang Air merupakan

orang yang sama. Nama Pu Manukū juga pernah muncul sebanyak dua kali namun ia memakai gelar Rakai Pikatan pada prasasti Wanua Tengah I (863 M)⁸³.

Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh yang berbeda namun memiliki nama yang sama. Pendapat ini didasarkan pada nama penguasa *watak* Patapān yang berbeda yang disebutkan dalam prasasti Kayumwungan dan Dang Karayān Partapān Ratnamaheśwara Sida Busu Plār pada prasasti Gondosuli II. Berdasarkan pendapat Umar (1970) yang mengutip pendapat de Casparis (1950) bahwa Rakai Patapan Pu Manuku ini diidentikkan dengan Rakarayan Patapān Pu Palar (prasasti Kayumwungan, 824 M) atau Dang Karayan Partapān Pu Palar (prasasti Gondosuli II, 832 M) atau dengan Rakai Garung (prasasti Mantyasih 907 M) (Casparis, 1950: 121-126; Umar, 1970: 8). Identifikasi ini sepertinya hanya didasarkan pada dugaan masa pemerintahan Rakai Garung yang kemungkinan memerintah antara tahun 819 M - 838 M. Namun identifikasi Casparis ini patut disanggah karena prasasti Munḍu^oan yang ditemukan tahun 807 M ini memuat nama penguasa Patapān yang berasal diluar masa pemerintahan Rakai Garung. Sehingga dapat dikatakan disini bahwa Rakai Patapan Pu Manuku, Rakai Patapān Pu Palar maupun Dang Karayan Partapān Busu Plār merupakan tokoh yang berbeda dengan Rakai Garung.

Dengan demikian, sejauh ini nama penguasa *watak* Patapān adalah Rakai Patapān Pu Manuku (prasasti Munḍu^oan, 807 M), Rakai Patapān Pu Palar (prasasti Kayumwungan, 824 M), Dang Karayan Partapān Busu Plār (prasasti Gondosuli II, 832 M) dan Rakai Patapān Pu Manuku (prasasti Tulang Air, 850 M). Pada prasasti Gondosuli II, nama penguasa *watak* ini di dahului oleh kata sandang *dang*. Hal ini mengindikasikan bahwa penguasa *watak* Patapān pada saat itu adalah seseorang yang mungkin berasal dari golongan pedagang (*waisya*). Kemungkinan yang terjadi adalah Rakai Patapān Pu Manuku⁸⁴ hanya memerintah

⁸³ Nama lengkap dari penguasa wilayah yang mengeluarkan prasasti Wanua Tengah I adalah *Rakai Pikatan Pu Manuko*

⁸⁴ Menurut Boechari, kata *manuku* yang dalam kamus bahasa Jawa kuno berarti menyerang; mungkin dapat disamakan artinya dengan kata *manungku* (*puja*) atau *manekung* dalam bahasa Jawa modern yang mempunyai arti mengheningkan cipta atau bersemedi. Kata ini mungkin digunakan oleh seorang tokoh yang telah mengundurkan diri dari pemerintahan (Poesponegoro, ed. 1993: 116). Bagi raja-raja masa Jawa Kuno, setelah mengalami tingkat kedua dalam kehidupan (*grhastha*), mereka akan mengundurkan diri ke hutan untuk bertapa. Misalnya saja raja

watak Patapān selama beberapa tahun saja, kemudian ia digantikan oleh Rakai Patapān Pu Palar/Dang Karayan Partapān Busu Plār antara tahun 824-832 M. Selanjutnya, ia memerintah *watak* Patapān lagi pada masa Rakai Pikatan memerintah Kerajaan Mataram Kuno.

IV. 2. 4. 2. Sang Patoran

Tokoh selanjutnya yang disebut dalam prasasti Munḍu^oan adalah sang Patoran. Tokoh ini kemungkinan merupakan seseorang yang berasal dari kasta *waisya*—dibuktikan dengan kata sandang *sang* dan tanpa mencantumkan nama jabatan—yang kemungkinan besar merupakan seorang pedagang. Nama sang Patoran tidak ditemukan pada prasasti manapun.

IV. 2. 4. 3. Saksi (Pejabat yang hadir)

IV. 2. 4. 3. 1. Pejabat tingkat *watak*

Tokoh-tokoh yang disebut selanjutnya adalah para saksi. Hal ini diketahui dengan adanya *pasēkpasēk* yang diterima oleh masing-masing pejabat. Pejabat-pejabat yang disebutkan dalam prasasti Munḍu^oan adalah pejabat tingkat *watak* dan pejabat tingkat *wanua*. Jabatan di tingkat *watak* baik di bawah seorang *rakai* atau seorang *pamgat*, yang paling utama adalah *juru* (atau *tuhān*) *ning kanayakān*, *patih* dan *wahuta*. Jabatan lainnya adalah *citralekha*, *mataṇḍa* dan *parujar*. Pemungutan pajak biasanya dikoordinasikan oleh *tuhān ning kanayakān*, sedangkan pengelolaan penghasilan daerah *watak* diawasi oleh pejabat *patih* (Poesponegoro, ed. 1993: 203).

Sedangkan pejabat tingkat *wanua* terdiri atas *kalang*, *gusti*, *winkas*, *parujar*, *tuha banua*, *rāma matuha*, / *rama maratā*, *juru*, *tuha gusali*, *pande kalaṅ*, *kalaṅ*, *tunggu durung*, *kalaṅ maṅuwu*, *wariga*, *tuha kalaṅ*, *kalima*, *wadwa rarai*, *parujar niṅ juru*, *patṅahan niṅ juru*, *hulu wwatan*, *mula/ mulawai*,

Pikatan dan Erlangga pada akhir hidupnya mengundurkan diri untuk menjadi pendeta dengan gelar Jatiningrat (Santiko, 2005: 129).

kulapati, tuhālas, hulu turus, hulu air, marhyang dan mapkan (Tedjowasono, 1981: 51). Pejabat tingkat *wanua* yang disebutkan dalam prasasti Muṇḍu^oan adalah *rama, kalima, juru mure, danda mureṅ, parwuwus*, serta *manderparang*. Menurut Tedjowasono (1981) setiap *wanua* banyak memiliki pejabat yang mengurus bidang kerja yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari yang disebut *rama*. Ada pejabat-pejabat *wanua* yang merupakan pejabat tingkat inti, ada pula yang muncul sesuai dengan keadaan setempat. Semuanya sederajat karena *pasěkpasěk* yang mereka dapatkan sama besarnya.

a. Patih

Pejabat tingkat *watak* yang disebut pertama kali dalam prasasti Muṇḍu^oan adalah seorang pejabat *patih* yang berasal dari Kayumwungan bernama Sang Rupyān. Pejabat *patih* merupakan jabatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak karena *patih* merupakan nama jabatan yang pertama disebut yang dilarang memasuki wilayah *sīma*. Seperti yang telah disebut sebelumnya, pejabat *patih* bertugas untuk mengawasi pengelolaan penghasilan daerah *watak*. Seorang *patih* biasanya memiliki *parujar* sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat ini dibantu oleh pejabat *parttaya* atau *pratyaya* (Poesponegoro, ed, 1993: 203).

b. Wadu^oa

Tokoh selanjutnya adalah *wadu^oa* (*wadwa*) Rakai Patapān yang bernama Sang Palindua. Kata *wadwa* menurut Zoetmulder (1995: 1365) berarti anak buah, pengikut, pasukan (yang rendah). Kemungkinan jabatan ini berhubungan dengan perwakilan (wakil) seorang penguasa pada upacara penetapan *sīma*.

c. Partaya

Selanjutnya, disebut seorang *partaya* bernama Sang Pageh. Pada Kamus Jawa Kuno Zoetmulder (1995: 783) kata ini berarti kategori pejabat. *Pratyaya* (Skr) berarti mempunyai kepercayaan kepada, percaya (kepada orang lain dan diri sendiri). Menurut Boechari (Poesponegoro, ed, 1993: 203, catatan 142) *parttaya* berasal dari kata *pratyaya* yang seharusnya dieja *pratyāya* dan bermakna 'petugas yang mengurus *aya* (pendapatan)'. Dalam hal ini bukan hanya

pendapatan saja yang dicatat, tetapi juga pengeluaran (*wyaya*). Ke-3 pejabat yang pertama kali disebutkan sebagai saksi ini (*patih*, *wadwa*, dan *partaya*) mendapatkan *pasěkpasěk* yang sama besarnya yakni 1 *dhārana* uang perak dan sepasang kain. 1 uang *dhārana* perak dapat memiliki berat 38, 601 gram.

d. Erbarangan

Tokoh selanjutnya memiliki jabatan sebagai *erbarangan*. Namun tidak diketahui siapa pemilik jabatan ini. Pada lempeng I prasasti Muṇḍu^oan, *erbarangan* dinyatakan: [*tanka*]*tamāna deniḥ* ^o*erbaraṇan* (tidak boleh dimasuki oleh *erbarangan*). Apa fungsi dari jabatan ini dan siapa pejabatnya tidak diketahui. Namun ia mendapatkan *pasěkpasěk* sebesar 8 *māsa* uang perak dan sepasang kain. 1 *māsa* uang perak berbobot 2, 412 gram, sehingga 8 *māsa* uang perak yang didapatkan oleh erbarangan ini dapat disamakan dengan 19, 296 gram.

f. Wahuta Ptir

Selanjutnya disebutkan tokoh yang memiliki jabatan sebagai *wahuta ptir* yang berasal dari desa Paṇḍakyan. Sama seperti *patih*, jabatan *wahuta* merupakan jenis jabatan pemerintahan tingkat *watak*. Baik *patih* maupun *wahuta* sama-sama tidak boleh memasuki wilayah *sīma*. Menurut Zoetmulder (1985: 1368) *wahuta* merupakan nama pejabat atau pelaksana yang dapat dihubungkan dengan gelar lain. Jabatan *wahuta ptir* juga ada di prasasti Tulang Air, hanya saja di prasasti ini disebut *wahuta patir* yang dijabat oleh orang yang bernama si Hayu. Kata sandang yang dipakai oleh pejabat ini adalah *si* yang merupakan sebutan bagi penduduk biasa. Namun menilik dari besarnya *pasěkpasěk* yang diterima oleh *wahuta ptir* yang besarnya 1 *dhārana* uang perak serta sepasang kain, dapat dipastikan kedudukan *wahuta ptir* dan *patih* pada prasasti Muṇḍu^oan ini sama tingginya.

g. Pitungtung

Setelah *wahuta ptir*, pejabat yang mendapatkan *pasěkpasěk* adalah *pitungtung* yang kemungkinan berjumlah 5 orang (*pitungtungnya* 5), masing-

masing mendapatkan 5 *māsa* uang perak dan sepasang kain. *Pitungtung* berasal dari kata *pituy* yang berarti ayah kakek ayah, anak *cicit* (7 generasi ke atas atau 7 generasi ke bawah) (Zoetmulder, 1995: 829). Dalam hal ini, *pitungtung* dapat diartikan pejabat rendahan atau pesuruh. *Pasēkpasēk* berupa uang perak yang diterimanya sebesar 5 *māsa* dapat disamakan dengan 12,06 gram per orang.

IV. 2. 4. 3. 2. Pejabat tingkat *wanua*

Selanjutnya disebutkan saksi-saksi yang merupakan pejabat dari desa setempat yakni *rama* (kepala desa) dari Muṇḍu^oan, *kalima*, *juru mure*, *danda mureng* yang berasal dari Haji Huma, *juru* bernama *si ni*, *parwuwus*, dan *manderparang*. *Kalima* merupakan jenis jabatan yang telah muncul sejak tahun 824 M di prasasti Kayumwungan. Jabatan ini juga muncul di prasasti Tri Tepusan 842 M, prasasti Tulang Air 850 M, prasasti Siwagrha 856 M, prasasti Humanding 875 M, prasasti Jurungan 876 M, prasasti Haliwangbang 877 M, prasasti Salimar 880 M, prasasti Poh Dulur 890 M, prasasti Panunggalan 896 M, prasasti Telang I 904 M, prasasti Poh 905 M, prasasti Mantyasih 907 M, dan prasasti Taji Gunung 910 M. Menurut Boechari (Poesponegoro, ed. 1993: 204 catatan 145) tidak diketahui apa tugas sesungguhnya dari seorang *kalima*⁸⁵ meskipun arti katanya cukup jelas, yaitu orang yang kelima atau kelima-limanya. Kecuali di prasasti Poh Dulur dan prasasti Taji Gunung, jabatan *kalima* dipegang oleh orang biasa. Kemungkinan adalah penduduk desa setempat.

Jabatan *juru* dapat disamakan dengan *tuha*, yakni kepala dari orang-orang seprofesi. Sejauh ini tidak pernah disebutkan jabatan *juru mure* dalam prasasti sehingga tidak diketahui apa fungsinya. Jabatan *danda* disebutkan di prasasti Tulang Air 850 M, prasasti Mangilihi A 864 M, prasasti Kapuhunan 878 M. Dari penyebutan jabatan ini, kecuali pada prasasti Mangilihi dijabat oleh orang biasa. Hal ini diketahui dari kata sandang yang dipakai oleh orang yang memegang jabatan ini.

⁸⁵ *Kalima* berasal dari kata dasar *lima* yang memiliki arti lima bersama, sebagai yang kelima, bulan ke-5 (Zoetmulder, 1995: 597)

Jabatan *parwuwus* sinonim dari *parujar*. Fungsi dari seorang *parwuwus* ini adalah sebagai juru bicara. Penyebutan kata ini terbatas pada prasasti yang berasal dari masa sebelum pemerintahan Rakai Kayuwangi, yaitu prasasti Harinjing A 804 M, prasasti Kayumwungan 824 M, dan prasasti Tulang Air 850 M. Hanya ada satu prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi yang menyebut kata ini, yakni prasasti Talaga Tañjung 862 M. Sedangkan *parujar* mulai digunakan pada prasasti Tri Tepusan 842 M, dan setelah itu banyak digunakan pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan penerusnya. Sama seperti jabatan yang lainnya, jabatan ini merupakan jabatan tingkat *wanua* yang dijabat oleh penduduk setempat. Selain diketahui dari kata sandang yang dipakai, bukti lain bahwa mereka adalah orang biasa adalah *pasěkpasěk* yang mereka terima tidaklah sebesar pejabat lainnya, yakni hanya berupa uang perak yang tidak disebutkan berapa jumlahnya dan sepasang kain jenis *kayanurupa*.

Pasěkpasěk terakhir dalam prasasti Muṇḍu^oan diberikan kepada *citralekha* Rakai Patapān yang bernama Sang Minanga. Ia mendapatkan uang perak sebesar 8 *māsa* dan sepasang kain. Jumlah *pasěkpasěk* yang diterima Sang Minanga ini sama besarnya seperti yang diterima oleh *erbarangan*. Adanya kesamaan jumlah *pasěkpasěk* ini mengindikasikan bahwa baik *erbarangan* maupun *citralekha* merupakan orang-orang yang berasal dari strata sosial yang sederajat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang *rakai* dapat memiliki *citralekha* sendiri terutama bagi penguasa wilayah yang berkedudukan sebagai raja kecil yang mendapatkan gelarnya berdasarkan garis keturunan tertentu. Berikut tabel jabatan yang disebutkan dalam prasasti Muṇḍu^oan dan prasasti Tulang Air.

Tabel 4. 4. Jabatan pada prasasti Muṇḍu^oan dan prasasti Tulang Air

No.	Jabatan	Prasasti Muṇḍu ^o an	Prasasti Tulang Air
1.	Rakai	√	√
2.	Patih	√	√
3.	Sirikan		√
4.	Tiruan		√

5.	Manghūri		√
6.	Palarhyang		√
7.	Wlahhan		√
8.	Dalanan		√
9.	Tawān		√
10.	Tirip		√
11.	Langpi		√
12.	Wadihati		√
13.	Makudur		√
14.	Wadwā	√	√
15.	Halaran		√
16.	Parwuwus	√	√
17.	Tuhān / Juru	√	√
18.	Wahuta patir	√	√
19.	Paṇḍakyan		√
20.	Kalima	√	√
21.	Juru limus		√
22.	Wariga		√
23.	Silijuru		√
24.	Hulair		√
25.	Manggala		√
26.	Mapakan		√
27.	Tuhalas		√
28.	Partaya	√	
29.	Erbarangan	√	
30.	Pitungtungnya	√	
31.	Rama	√	
32.	Juru mure	√	
33.	Danda	√	
34.	Kaṇḍangan	√	
35.	Manderparang	√	
36.	Citrlekha	√	

IV. 2. 5. Peristiwa

Prasasti Muṇḍu^oan memperingati penetapan desa Muṇḍu^oan dan Haji Huma menjadi *sīma*. Pada lempeng pertama, peristiwa pokok penetapan *sīma* dipahatkan dengan jelas. Selain itu, maksud dari “*sumusuk lmah*” (membatasi tanah) ini adalah untuk tempat memelihara kambing sebagai wujud kewajiban kepada raja. Pemeliharaan kambing milik Rakai Patapān Pu Manuku itu diserahkan kepada wakilnya yang bernama sang Patoran. Nama orang yang disertai tugas memelihara kambing itu adalah sang Madmak. Untuk maksud

pemeliharaan kambing ini, maka ia membuat perumahan yang di Walawindu. Setelah pemberian anugerah wilayah *sīma* Munḍu^oan dan Haji Huma terlarang bagi *erbarānan* serta *mangilala*. Tidak diketahui apa dan fungsi dari *erbarānan* ini. Segala jenis jual beli serta denda atas pelanggaran ketentuan wilayah *sīma* di Munḍu^oan dan Haji Huma tidak perlu dibayarkan kepada Rakai Patapān, melainkan dipakai untuk pemeliharaan *saṅ hyaṅ taṅḍa patapān*. Ketentuan ini berlaku bagi Sang Patoran dan semua orang yang tinggal di Walawindu yang merupakan penggembala kambing. Bagi yang melanggar ketentuan ini akan menemui *pañca mahāpataka*. Selanjutnya disebutkan para saksi yang datang dalam upacara penetapan *sīma* beserta *pasēkpasēk* yang mereka terima.

Pada prasasti Munḍu^oan, hanya disebut *mangilala* saja. Kata ini lengkapnya *mangilala ḍṛwya haji*. Prasasti lain yang menyebut kata ini secara tidak lengkap misalnya prasasti Kwak 879 M, prasasti Ra Mwi 882 M, prasasti Balingawan 891 M, prasasti Poh 905 M, prasasti Hariñjing B 921 M, dan prasasti Wulakan 927 M. *Mangilāla* berasal dari kata *kilala* yang berarti ‘mendapatkan pemungutan hasil dari; berhak untuk pelayanan, dari’ (Zoetmulder, 1995: 499). Sedangkan *ḍṛwya haji* berarti kepunyaan raja dalam bentuk pajak, pelayanan, dsb (Zoetmulder, 1995: 226). *Mangilāla ḍṛwya haji* secara harafiah berarti ‘menggambil milik raja’, merupakan petugas yang bertugas untuk raja dan berfungsi memungut pajak.

Di antara *mangilāla ḍṛwya haji* ini memiliki hubungan dengan suatu bidang profesi tertentu, seperti bidang kerajinan, kesenian, perdagangan, dsb (Jones, 1984: 137-138; Rahardjo, 2002: 295). Menurut Edi Sedyawati (1985: 342-347) sebutan *mangilāla ḍṛwya haji* memberi kemungkinan berbagai penafsiran. Penafsiran yang dapat dikemukakan mengenai *mangilāla ḍṛwya haji*, adalah:

1. memungut (pemungut) pajak dari penduduk dengan pengertian bahwa pajak itu adalah hak atau milik raja,
2. mengambil (pengambil) hak raja dalam arti tidak membayar pajak,
2. mengambil (pengambil) nafkah dari harta raja atau dengan kata lain makan gaji dari raja.

Jika penafsiran pertama benar, artinya semua orang yang terdaftar sebagai *mangilāla dṛwṃya haji* itu adalah para pemungut pajak. Hal ini sukar dibayangkan mengingat bahwa yang tercantum puluhan jenis pekerjaan, termasuk para tukang, pengrajin, seniman dan pedagang yang lazimnya justru dikenai pajak. Jika mereka semua adalah para pemungut pajak, maka bisa jadi jumlah pemungut lebih banyak dibandingkan penduduk yang dipunguti pajak.

Penafsiran ke-2 diajukan oleh van Naerssen (1977: 42-43). Keberatan yang diajukan terhadap penafsiran itu adalah mengenai penyamaan arti *warga kilalān* dan *mangilāla dṛwṃya haji*, seharusnya kedua istilah itu perlu dibedakan artinya. Para *kilalān* itu umumnya disebut langsung sesudah penyebutan *mangilāla dṛwṃya haji*, dalam hubungan dengan batas-batas ketentuan “bebas pajak” dari *sīma* yang bersangkutan. Jika di *sīma* tersebut terdapat jumlah yang lebih dari yang ditentukan itu, maka yang berlebih itu terkena pajak. Contoh pembatasan bebas pajak pada prasasti masa Balitung, Dakṣottama, dan Siṅḍok adalah pada prasasti Kayu Ara Hiwang 901 M (*OJO XXIII*), prasasti Sugih Manek 915 M (*OJO XXX*), dan prasasti Jērujēru 930 M (*OJO XLIII*). Dari uraian yang telah disampaikan, jelaslah bahwa *warga kilalān* sesuai dengan arti katanya, “yang dikenai pengambilan atau pungutan” berdasar batas batas usaha yang telah ditentukan. Adapun *mangilāla dṛwṃya haji* termasuk di dalamnya para *kilalān* yang usahanya dibatasi artinya mereka yang tidak membayarkan pajaknya. Jadi golongan ini sesuai dengan tafsiran ke-2 di atas.

Selanjutnya, jika penafsiran ke-3 benar, itu berarti *mangilāla dṛwṃya haji* adalah seluruh pekerja yang mendapat upah “dari raja”, atau yang mengabdikan langsung kepada raja. Untuk hubungan kerja yang demikian dekat dengan raja, mungkin sekali mereka itu tinggal di sekitar raja, jadi dalam lingkungan *rajya*. Dalam sejumlah prasasti memang ada disebutkan *watēk i jro* (warga dalam keraton) sebagai bagian *mangilāla dṛwṃya haji*. Jadi, penafsiran ke-3 juga benar, tetapi tidak untuk keseluruhan *mangilāla dṛwṃya haji*, tetapi hanya sebagian saja yaitu yang disebut *watēk i jro*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penafsiran ke-2 atau ke-3 benar, tetapi masing-masing berkenaan dengan unsur-unsur yang berbeda, yakni *warga kilalān* dan *watēk i jro*. Penafsiran pertama juga dapat dianggap benar, karena ada

ungkapan-ungkapan dalam prasasti yang menunjukkan *ḍrwwya haji* adalah pajak yang di dalam beberapa prasasti harus dibagi tiga. Pembagian *ḍrwwya haji* menjadi tiga hanya berlaku pada *sīma* yang mempunyai bangunan suci. Pembagiannya adalah 1/3 bagian untuk bangunan suci bersangkutan, 1/3 bagian untuk *saṅ makmitan sīma* (yang menjaga *sīma*) dan 1/3 bagian lagi untuk *saṅ mangilāla ḍrwwya haji*, artinya masuk kas kerajaan; maka penafsiran pertama sesuai dengan fungsi *mangilāla ḍrwwya haji*, yakni mereka yang memungut pajak atas nama raja.

Dari keterangan itu semua *mangilāla ḍrwwya haji* dibedakan atas beberapa unsur yang masing-masing mempunyai peranan berbeda, yakni: mereka yang memungut pajak atas nama raja, mereka yang dibebaskan dari pajak dan mereka yang mendapat upah dari raja. Unsur pertama adalah petugas administratif, unsur ke-2 adalah para usahawan, baik dengan cara jual beli maupun memproduksi barang, sedangkan unsur ke-3 adalah mereka yang langsung melayani kebutuhan keraton (Sedyawati, 1985: 342-347, Rahardjo, 2002: 295-296). Tidak disebutkannya kata *mangilāla ḍrwwya haji* secara lengkap ini kemungkinan pajak yang diambil bukan untuk raja melainkan untuk penguasa wilayah Patapān.

Selanjutnya disebutkan mengenai masalah jual beli (*madual mawli*) yang kemungkinan berhubungan dengan kambing. Adanya penyebutan *sukhaduḥka* menunjukkan ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. *Sukhāḍuḥka* adalah denda-denda yang dikenakan atas segala macam tindak pidana. Dalam naskah hukum, *sukhāḍuḥka* disebut dengan *hala hayu*; denda-denda ini dalam prasasti juga termasuk dalam *ḍrwwya haji*. Keterangan mengenai tindak pidana dan ketentuan dendanya ada di dalam naskah-naskah hukum (*āgama*)⁸⁶ (Poesponegoro, ed. 1993: 221).

⁸⁶ Naskah-naskah hukum yang telah diterbitkan misalnya *Śiwaśāsana* oleh J. C. G. Jonker: *Een Oudjavaansch wetboek. Vergeleken bij Indische Rechtsbronnen*. Dissertasi, Leiden, 1985, dan *Swarajambhu* dapat dilihat pada tulisan F. H. Van Naerssen : “De Āṣṭadasawyawahāra in het Oudjavaansch” *BKI* 100 , 1941: 357-376. Naskah *Swarajambu* ini merupakan terjemahan dengan penjelasan dari bab VIII kitab *Mānawadharmmaśāstra* yang sudah diberi penjelasan oleh beberapa ahli hukum di India (Poesponegoro, 1993: 222, catatan kaki no. 197 dan 198)

Ketentuan *sīma wanua* Muṇḍu^oan dan Haji Huma ini berlaku hingga akhir zaman (*dlaha ning dlaha*). Bagi yang melanggar ketentuan, akan mendapat lima bencana besar (*pañca mahāpataka*). *Pañca mahāpataka* merupakan bagian kutukan pada prasasti. Kutukan biasanya diucapkan oleh *sang makudur* ketika upacara penetapan *sīma*. Pada saat pengucapan mantra tentunya dibarengi dengan pembakaran kemenyan atau dupa. Menyusul kemudian upacara potong ayam yang dilandaskan pada *sang hyang kulumpang*, membanting telur pada *watu sīma* dan menaburkan abu. Upacara ini mengandung arti *magis simbolis*. Kekuatan magis ini ditujukan kepada siapa saja yang apabila di kemudian hari melanggar ketentuan daerah *sīma*, mereka akan mendapat malapetaka yang mengerikan seperti seekor ayam yang kepalanya terpisah dari badannya, akan hancur lebur seperti telur yang telah pecah dan akan menjadi abu seperti kayu yang telah hangus terbakar. Bahkan malapetaka yang akan menimpa dirinya masih ditegaskan lagi, jika pergi ke hutan akan dimakan ular berbisa, jika pergi ke ladang akan disambar petir sekalipun musim kemarau, jika pergi ke bendungan akan tenggelam disahut buaya. Sumpah dan kutukan ini disampaikan dengan jelas agar terdengar oleh semua saksi sehingga diharapkan mereka tidak akan melakukan pelanggaran (Haryono, 1980: 47).

Urutan pemberian *pasēkpasēk* ini dimulai dari pejabat *patih* di Patapān yang berasal dari Kayumwungan bernama Sang Rupyān dan dari Mantyasih yang bernama Sang Palindua. Mereka berdua adalah pejabat tertinggi yang hadir pada upacara. Hal ini dibuktikan dari besarnya *pasēkpasēk* yang mereka terima dibandingkan dengan pejabat lainnya. Pemberian *pasēkpasēk* diakhiri dengan *citraklekha* penulis prasasti bernama Sang Minanga.